



**ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
REMBANGAN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Yuni Fridawati
NIM 130810101190**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
REMBANGAN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Yuni Fridawati
NIM 130810101190**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

.BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan terhadap berwisata akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia serta perkembangan penduduk dunia yang semakin membutuhkan *refreshing* atas kejenuhan dari kesibukan rutin dalam bekerja. Pariwisata merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pariwisata merupakan perpindahan atau seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya yang bersifat sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutinnnya, aktivitas tersebut dilakukan selama mereka tinggal di tempat wisata yang dituju dan fasilitas sebagai pemenuhan kebutuhan mereka (Marpaung, 2002:13). Peningkatan kunjungan wisatawan dapat mempengaruhi perkembangan pada adanya suatu kegiatan pariwisata. Tabel 1.1 menjelaskan bahwa adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun di Indonesia. Jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara di tahun 2012 mencapai 253,33 juta orang, tahun 2013 mencapai 258,84 juta orang, tahun 2014 mencapai 260,64 juta orang, dan tahun 2015 mencapai 265,64 juta orang (Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015, 2016:74-76).

Tabel 1.1 Data Perkembangan Jumlah Wisatawan di Indonesia Tahun 2012-2015 (juta orang)

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2012	8,04	245,29	253,33
2013	8,80	250,04	258,84
2014	9,44	251,20	260,64
2015	10,41	255,05	265,46

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015, 2016

Peranan pariwisata meliputi tiga segi, yaitu segi ekonomi (sumber devisa dan pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan pekerjaan), dan segi budaya (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan), ketiga segi tersebut tentunya berlaku pula bagi wisatawan-wisatawan domestik (Hiariey dan Sahusilawane, 2013). Pariwisata dalam aspek ekonomi dapat memberikan pemasukan kepada

pemerintah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan dari pajak atas pengadaan suatu kawasan wisata. Kontribusi pariwisata berpengaruh pula terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat sehingga individu maupun masyarakat dapat memiliki umur panjang, keadaan sehat, dan kehidupan yang produktif. Dampak pariwisata terhadap kehidupan perekonomian dimana terdapat kegiatan pariwisata yang dikembangkan dan di tempat yang dikunjungi wisatawan dapat memberikan kesejahteraan dan pembangunan nasional (Yoeti, 2008:04). Pariwisata jika dikelola dengan tepat dapat mempengaruhi minat dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Tinggi rendahnya jumlah wisatawan dapat mempengaruhi besarnya pemasukan kepada pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa kondisi alam, flora, dan fauna sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, bahkan peninggalan-peninggalan jaman dahulu, sejarah, seni, dan budaya bangsa Indonesia menjadi sumber daya serta modal dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan guna meningkatkan serta mensejahterakan masyarakat.

Pemasukan aspek ekonomi tidak hanya berasal dari uang yang dibelanjakan para wisatawan, melainkan pula dari adanya pembangunan penanaman modal asing. Penanaman modal asing seperti pembangunan hotel-hotel, pembangunan sarana jalan, *airport*, pelabuhan, dan telekomunikasi. Adanya pembangunan dalam penanaman modal asing tersebut akan berdampak pada penarikan pajak-pajak oleh pemerintah pusat maupun daerah yang hasilnya akan meningkatkan devisa negara maupun pendapatan daerah. Pariwisata dilihat dari aspek ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, karena dengan adanya pembangunan kawasan wisata akan menimbulkan menjamurnya pedagang asongan di sekitar kawasan wisata. Akan tetapi, kelemahan dari menjamurnya pedagang asongan di sekitar kawasan wisata yaitu biasanya dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur karena mereka lebih mementingkan mendapatkan uang untuk makan daripada mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, adanya unsur paksaan untuk membeli dagangan

mereka sehingga wisatawan merasa terganggu, dan memunculkan beralihnya tenaga kerja sektor produksi pertanian ke perdagangan.

Pariwisata dalam aspek sosial dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Lapangan pekerjaan dapat tercipta karena adanya pembangunan dan pengembangan wisata yang dilakukan di suatu daerah yang dinilai memiliki potensi menguntungkan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Kegiatan pariwisata juga mengarah pada kegiatan aksi sosial yaitu adanya interaksi pengunjung kepada masyarakat setempat di lokasi kawasan wisata yang dikunjungi, yang artinya kegiatan pariwisata berpengaruh terhadap tingkah laku individu maupun kelompok dalam berwisata. Individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan pariwisata tentunya akan saling berhubungan langsung dengan orang-orang yang berkebangsaan dan memiliki lingkungan sosial yang berbeda-beda. Masing-masing wisatawan memiliki kebiasaan, tingkah laku, dan keinginan yang berbeda-beda bahkan bertolak belakang dengan tata cara hidup masyarakat yang dikunjungi.

Aspek sosial dari adanya kegiatan pariwisata memberikan makna kesempatan antara pengunjung dan masyarakat di lokasi kawasan wisata untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal sikap dasar yang dimiliki dalam pergaulan. Bentuk interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, misalnya wisatawan menghabiskan waktu wisatanya di tempat-tempat yang mewah dan bersenang-senang menurut caranya masing-masing, sedangkan masyarakat setempat melayani wisatawan sebagai pelayan restoran, hotel, bagian keamanan, dan lain sebagainya. Dampak sosiologi pariwisata bagi penerima wisatawan (masyarakat) adalah timbulnya hasrat untuk meniru, pengaruh adat atau budaya, dan perubahan terhadap keramahan. Menurut *World Tourism Organization* bahwa pengaruh wisata terhadap kehidupan sosial masyarakat disebabkan berdasarkan oleh tiga hal, antara lain (Surwiyanta, 2003):

1) *Polarization of The Population* (Pengaruh terhadap Populasi)

Penduduk setempat sudah terpopulasi, perolehan pendapatan masyarakat tidak proporsional, kebanyakan penduduk ingin menjadi kaya secara mendadak.

2) *Breakdown of The Family* (Kerusakan Kekeluargaan)

Masuknya wisatawan asing dan terjadinya intensitas pergaulan antara yang melayani dengan yang memberikan pelayanan menimbulkan hal negatif demi memenuhi kebutuhan biologis masing-masing.

3) *Development of The Attitudes of a Consumption-Oriented Society* (Perkembangan Sikap)

Berkembangnya tingkah laku masyarakat yang berorientasi pada konsumsi dan pengaruh penyakit masyarakat tersebut, seperti pelacuran, kecanduan obat, mabuk-mabukan, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Segi positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pariwisata, antara lain sebagai berikut:

1) Struktur Sosial

Timbulnya transaksi kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor pelayanan, pemerataan pendapatan masyarakat, berkurangnya perbedaan dalam kesempatan berusaha.

2) Modernisasi Keluarga

Kaum wanita memperoleh status baru dari petani tradisional berubah menjadi pedagang asongan, pemilik toko cenderamata, restoran ataupun bekerja pada kerajinan tangan dan karyawan hotel.

3) Peningkatan dalam Wawasan Masyarakat

Terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang positif terutama dalam etika dan komunikasi antar sesama.

Pariwisata dalam aspek budaya dapat menjadi sarana pemerintah untuk memperkenalkan dan memberi informasi serta pengetahuan budaya yang dimiliki suatu daerah kepada wisatawan lokal maupun asing. Pemerintah dapat melakukan upaya memperkenalkan budaya suatu daerah dengan cara mengadakan festival budaya di kawasan wisata, hal ini juga dapat berakibat pada meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Batasan wisata budaya terhadap

perjalanan wisatawan atas dasar keingintahuan yang bertujuan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengunjungi tempat lain atau luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, cara hidup, kebiasaan dan adat istiadat mereka serta budaya maupun seni mereka (Pendit, 2002:38). Aspek budaya memiliki daya tarik, seperti bahasa, kebiasaan masyarakat, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat, cara kerja dan teknologi, serta agama. Umumnya, wisatawan lebih tertarik menikmati budaya yang asli, khas, dan tradisional, sebab itu hal ini memikat masyarakat setempat di lokasi kawasan wisata untuk memelihara budaya yang khas dan asli agar bisa dipamerkan kepada wisatawan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah Utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Samudera Hindia di Selatan, dan Kabupaten Lumajang di Barat. Bahasa masyarakat Kabupaten Jember menggunakan bahasa Jawa dan Madura yang disebut budaya Pendalungan. Kabupaten Jember memiliki potensi wisata yang beragam, seperti pantai maupun keindahan alam yang masih sejuk dan asri untuk dinikmati. Berdasarkan data dari *website* resmi pemerintah Kabupaten Jember bahwa Kabupaten Jember memiliki banyak kawasan wisata, baik kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, maupun kawasan wisata budaya yang di dalamnya terdapat wisata edukasi, wisata sejarah, wisata religi, seni tari, dan lain-lain. Kawasan wisata alam meliputi pantai Bandalit, pantai Watu Ulo, pantai Papuma, pantai Pancer, pantai Payangan, air terjun Tancak Tulis, air terjun Antrokan Rayap, dan lain-lain. Kawasan wisata buatan meliputi Taman Botani, Tiara *Waterpark*, Niagara *Waterpark*, Mumbul *Garden*, Puncak Rembangan, dan lain-lain. Kawasan wisata budaya meliputi Tanoker, prasasti Congapan Sumberbaru, masjid Cheng Ho Sempusari, tari Lahbako, musik Patrol, dan lain-lain. Potensi kawasan wisata yang dimiliki Kabupaten Jember, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Potensi Kawasan Wisata Kabupaten Jember

A. Kawasan Wisata Alam		
No.	Nama Wisata	Lokasi
1.	Pantai Bandalit	Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo
2.	Pantai Watu Ulo	Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu
3.	Pantai Papuma	Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan
4.	Pantai Pancer	Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger
5.	Pantai Payangan	Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu
6.	Air Terjun Tancak Tulis	Desa Suci, Kecamatan Panti
7.	Air Terjun Antrokan Rayap	Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa
B. Kawasan Wisata Buatan		
1.	Taman Botani	Jalan Muhajir, Kecamatan Sukorambi
2.	Tiara <i>Waterpark</i>	Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari
3.	Niagara <i>Waterpark</i>	Kecamatan Ambulu
4.	Mumbul <i>Garden</i>	Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari
5.	Puncak Rembangan	Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa
C. Kawasan Wisata Budaya		
1.	Tanoker	Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo
2.	Prasasti Congapan Sumberbaru	Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru
3.	Masjid Cheng Ho Sempusari	Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates
4.	Tari Lahbako	Kabupaten Jember
5.	Musik Patrol	Kabupaten Jember

Sumber: Pemerintah Kabupaten Jember dan Pariwisata Kabupaten dan Kota Jember, 2017

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tahun 2011 jumlah wisatawan berjumlah 675.324 orang. Tahun 2012 jumlah wisatawan mengalami peningkatan menjadi 742.297 orang, kemudian tahun 2013 jumlah wisatawan mengalami kenaikan kembali berjumlah 830.237 orang, yang diikuti pada tahun-tahun berikutnya wisatawan mengalami kenaikan di tahun 2014 berjumlah 920.200 orang dan tahun 2015 berjumlah 1.055.794 orang. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Jember merupakan bukti bahwa banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Jember yang dapat dikunjungi dan ditingkatkan dalam pengembangan kegiatan pariwisata.

Tabel 1.3 Data Perkembangan Jumlah Wisatawan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015 (orang)

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2011	1.711	673.613	675.324
2012	1.682	740.615	742.297
2013	1.869	823.368	830.237
2014	2.672	917.528	920.200
2015	3.017	1.052.777	1.055.794

Sumber: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2017

Obyek wisata di Kabupaten Jember yang dapat menarik wisatawan yaitu kawasan wisata Rembangan yang terletak di kaki Gunung Argopuro, kurang lebih 12 kilometer dari Utara kota Jember. Kawasan wisata Rembangan didirikan di lahan seluas 13,45 hektar dengan ketinggian 650 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-ratanya berkisar antara 18° celcius dan 25° celcius. Secara administrasi, Rembangan adalah bagian dari Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (Pariwisata Kabupaten dan Kota Jember, 2017). Data kunjungan wisatawan pada kawasan wisata Rembangan mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2012 jumlah wisatawan kawasan wisata Rembangan berjumlah 83.077 orang, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan jumlah wisatawan yang pada akhirnya berjumlah 45.051 orang dan diikuti kenaikan di tahun berikutnya yaitu tahun 2014 berjumlah 67.230 orang, namun di tahun 2015 mengalami penurunan kembali yang berjumlah 56.630 orang (Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2017). Jumlah wisatawan pantai Papuma jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah wisatawan pada kawasan wisata Rembangan. Data kunjungan wisatawan pantai Papuma tahun 2012 berjumlah 254.714 orang, tahun 2013 berjumlah 244.418 orang, tahun 2014 berjumlah 298.688 orang, dan di tahun 2015 berjumlah 271.688 orang (Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2017).

Peningkatan maupun penurunan jumlah wisatawan tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola potensi kawasan wisata yang sudah dimiliki dengan strategi dan kelembagaan yang tepat. Potensi yang dimiliki

kawasan wisata Rembangan sangat beragam seperti adanya budidaya buah naga, ternak sapi perah, pemandangan alam yang asri, kolam renang, dan lain sebagainya. Budidaya buah naga dapat dijadikan sebagai kawasan agrowisata untuk menarik wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember. Wisatawan juga akan disuguhkan dengan jejeran tanaman buah naga yang juga dibudidayakan oleh warga setempat di sepanjang perjalanan menuju puncak Rembangan. Tanaman budidaya buah naga dengan konsep agrowisata dapat memikat wisatawan karena wisatawan dapat memetik dan mencicipi buah naga secara langsung.

Peternakan sapi perah juga terdapat di lokasi kawasan wisata Rembangan yang juga menjual susu murni secara literan. Wisatawan yang berkunjung dapat menerima dan mengetahui informasi mengenai ternak sapi perah karena dapat melihat dan mencoba untuk pemerah susu sapi perah di lokasi kawasan wisata Rembangan. Pemandangan yang asri dan indah juga akan didapatkan oleh wisatawan yang berkunjung karena wisatawan dapat menikmati pemandangan alam dengan bersantai di warung-warung lesehan yang menghadap langsung ke pemandangan hamparan sawah serta dapat melihat kota Jember dari kejauhan. Puncak Rembangan memiliki penginapan, arena taman bermain, dan kolam renang untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung dalam waktu yang cukup lama atau beberapa hari.

Tantangan dan hambatan tentunya harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah Kabupaten Jember agar pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata Rembangan dapat berjalan terarah dan baik. Tantangan yang harus dihadapi seperti mengubah pola pikir masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan keindahan alami di lokasi kawasan wisata Rembangan, mengajak dan memperoleh dukungan peran pihak swasta dalam menanamkan modalnya baik di bidang perhotelan maupun restoran, dan menyebarluaskan atau mempromosikan kawasan wisata Rembangan yang harus digencarkan oleh masyarakat Jember. Hambatan yang harus dihadapi seperti perbaikan dan pengembangan strategi maupun peran pihak pemerintah dalam mendukung perkembangan kegiatan pariwisata di Jember, perbaikan dan pengembangan sarana-prasarana yang

mendukung kegiatan pariwisata, serta aksesibilitas dalam ketersediaan transportasi yang dapat mendukung wisatawan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “*Analisis Pengembangan Kawasan Wisata Rembangan Kabupaten Jember*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengembangan kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai pengembangan kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa fakta empirik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dengan tema serupa.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Jember maupun pengelola dalam mengkaji aspek-aspek yang berpengaruh pada pengembangan kawasan wisata Rembangan Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi teori yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu dengan tema yang sejenis, dan kerangka berpikir. Teori dalam penelitian ini adalah mengenai ekowisata, pengembangan kawasan wisata, dan pembangunan ekonomi. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hidayanto dkk (2009), Choirinnisa (2010), Evita dkk (2012), Setiawan (2015), dan Widyastuti (2016).

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ekowisata

Ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung pelestarian alam dan budaya serta perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Ekowisata mencakup pada tiga hal, seperti keberlangsungan lingkungan alam, manfaat ekonomi, dan diterima dalam sosial masyarakat. Ekowisata merupakan kegiatan wisata menuju suatu kawasan, baik pada kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, maupun kawasan wisata budaya yang bersifat informatif dan partisipatif dengan tujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan alam, sosial, dan budaya. Secara kelembagaan, ekowisata sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan suatu kawasan wisata yang berupaya menjaga dan melestarikan kehidupan lingkungan alam maupun budaya serta berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dengan adanya suatu tata kelola kawasan wisata yang terarah dan optimal (Satria, 2009). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ekowisata merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya (Kete, 2016:28). Kawasan wisata dapat dikelola secara optimal jika menjaga dan mempertahankan kelestarian alam lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi kawasan wisata, mengoptimalkan kepuasan wisatawan, dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan kawasan wisata. Adanya

kawasan wisata secara langsung memberi akses kepada masyarakat maupun wisatawan dalam memperoleh informasi mengenai kawasan wisata yang dikunjungi, menikmati pengalaman alam yang alami maupun buatan, dan menambah pengetahuan mengenai budaya setempat pada lokasi kawasan wisata. Wisatawan yang memiliki ketertarikan pada ekowisata bertujuan untuk mengunjungi lokasi kawasan wisata yang memiliki keindahan alam yang alami dan bagi masyarakat setempat di lokasi kawasan wisata akan memperoleh peluang dalam kegiatan bisnis (Mulyadi dan Fitriani, 2010).

2.1.2 Pengembangan Kawasan Wisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu peningkatan upaya pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna yang berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya serta mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kementerian Dalam Negeri, 2007). Penataan ruang berkaitan dengan penataan daerah yang di dalamnya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Kawasan wisata merupakan sektor multidimensional karena terdapat dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Perencanaan dalam pengembangan kawasan wisata diperlukan agar sektor dimensional tersebut dapat diperhatikan dan secara konsisten mengalami perkembangan, oleh karena itu pengembangan kawasan wisata memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Menurut Getz bahwa perencanaan kawasan wisata sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kontribusi pariwisata dalam kesejahteraan masyarakat maupun kualitas lingkungan (Wardiyanto dan Baquini, 2010:41). Yoeti menyatakan beberapa prinsip perencanaan kawasan wisata, antara lain (Hilma, 2013): (i) perencanaan

pengembangan kawasan wisata termasuk dalam kerangka pembangunan nasional suatu negara karena merupakan suatu kesatuan pembangunan nasional maupun regional dari pembangunan ekonomi negara; (ii) perlu pendekatan terpadu dengan sektor-sektor yang saling berhubungan dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata; (iii) perlunya koordinasi perencanaan fisik daerah maupun negara secara keseluruhan agar meminimalisir berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata; (iv) perlu didasarkan pada studi yang dibuat secara khusus dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata dengan memperhatikan perlindungan terhadap alam, lingkungan hidup, dan budaya; (v) perencanaan fisik didasarkan pada penelitian yang sesuai dengan keadaan lingkungan alam sekitar seperti berdasarkan faktor-faktor geografi, tidak hanya segi administratif; (vi) perencanaan dan penelitian perlu memerhatikan kelestarian ekologi guna pengembangan kegiatan kawasan wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan; (vii) perlu memerhatikan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan; (viii) perlu perencanaan fasilitas hiburan di daerah perkotaan maupun industri; dan (ix) perencanaan pengembangan kawasan wisata didasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan maupun bangsa.

Guna mengembangkan kawasan wisata diperlukan pendekatan terhadap organisasi pariwisata yang ada, baik pemerintah, masyarakat, pihak swasta, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan perencanaan kepariwisataan yang terstruktur, terarah, dan cermat dalam pengambilan kesepakatan aturan yang wajib ditaati bersama serta kewajiban pemerintah dan tanggungjawab pihak swasta dalam keberlanjutan pengembangan kegiatan pariwisata. Obyek wisata menurut Mappi dikelompokkan menjadi tiga jenis (Widyastuti, 2016), antara lain:

1) Obyek wisata alam

Obyek wisata alam merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan dengan sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam. Wisata alam misalnya laut,

pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam, dan lain-lain.

2) Obyek wisata budaya

Obyek wisata budaya merupakan hasil kegiatan wisata yang dirangsang oleh adanya obyek wisata berwujud hasil-hasil budaya masyarakat setempat, misalnya upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, dan lain-lain.

3) Obyek wisata buatan

Obyek wisata buatan misalnya sarana dan fasilitas olahraga, wahana permainan, hiburan (lawak, akrobatik dan sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

A. Strategi Pengembangan Kawasan Wisata

Pentingnya strategi dan perencanaan strategi dalam mengembangkan suatu kawasan wisata agar dapat dikenal dan tetap bertahan di dunia pariwisata. Strategi dalam manajemen organisasi adalah kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan organisasi (Nawawi, 2005:147). Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya (David, 2009:5). Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak atau pusat dan diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian, 2011:15). Strategi merupakan proses penyusunan serangkaian kegiatan kerja untuk membangun visi dan misi, menetapkan tujuan, dan merancang strategi dalam pencapaian tujuan tersebut. Kotler dan Fox menjelaskan bahwa perumusan suatu strategi harus berdasarkan dan berpedoman kepada: *Environment Analysis*, *Resources Analysis*, dan *Goals Formulation Steps* (Yoeti, 2005:35). Perumusan strategi kawasan wisata, dianjurkan melakukan tiga tingkatan berikut, antara lain:

- 1) melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata;
- 2) penyusunan strategi yang menyangkut kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan pariwisata; dan
- 3) strategi pengembangan pariwisata secara regional menyangkut aksesibilitas, fasilitas, obyek, dan atraksi wisata serta sarana pendukung lainnya.

B. Hubungan Kelembagaan terhadap Kawasan Wisata

Menurut North bahwa kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Menurut Schotter bahwa kelembagaan adalah regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penataan interaksi dalam situasi tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Secara garis besar, kelembagaan berarti aturan main yang berlaku dalam masyarakat disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat, interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial. Berdasarkan atas bentuknya (tertulis maupun tidak tertulis), kelembagaan digolongkan menjadi dua macam yaitu informal dan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. Adat-istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan dikelompokkan sebagai kelembagaan informal. Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lainnya. Organisasi sebagai bangunan atau tempat manusia berinteraksi, seperti organisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Ilustrasi dalam organisasi seperti tim olahraga (sepak bola maupun bola basket), dimana banyak orang yang terlibat baik sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dan lain sebagainya dengan tujuan bagaimana menjadi pemenang di setiap pertandingan (Syarif, 2013).

Kelembagaan adalah suatu bentuk pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat dalam kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama, dan dalam memperoleh kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian serta tempat berlindung (Anantanyu, 2011). Kelembagaan dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih, maupun pihak-pihak yang ikut bertanding di dalamnya. Jika terdapat ketidakjelasan dalam suatu kelembagaan akan menyebabkan pertandingan berjalan kacau dan tujuan menjadi pemenang di setiap pertandingan yang ditargetkan oleh tim tidak akan tercapai dengan baik.

Sumber daya manusia merupakan potensi manusia sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri beserta potensi diri yang dimiliki dan dapat berperan untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bersifat berkelanjutan. Terciptanya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berperan dalam suatu kelembagaan atau organisasi memerlukan reformasi peningkatan perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia yang dalam perencanaan perbaikannya dilakukan dengan sifat menyeluruh. Jika struktur, sistem, metode, teknologi informasi, dan alur kerja pada suatu kelembagaan sudah terencanakan dengan baik, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka suatu kelembagaan tidak dapat berjalan secara optimal. Peran penting sumber daya manusia dalam organisasi yaitu sebagai pengelola dan pelaksana sistem yang perlu memperhatikan aspek-aspek penting, seperti mengadakan pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan motivasi yang akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Adanya pendidikan dengan berbagai jenis diharapkan mampu meningkatkan berbagai bentuk nilai, seperti peningkatan rasional individu, produktivitas kerja, maupun penghasilan individu (Idris dan Ramel, 2007:69).

Perlunya peran penting suatu kelembagaan pariwisata di suatu daerah adalah untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang ada di suatu daerah. Kelembagaan pariwisata yang baik akan berpengaruh pada potensi peningkatan kawasan wisata daerah yang terkait agar memberi keuntungan yang positif bagi daerah kawasan wisata. Dinas Pariwisata adalah

badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (Primadany dkk., 2013).

Keterkaitan hubungan antara pariwisata dengan peran kelembagaan yang dikelola secara terarah dan tepat akan memicu peningkatan kawasan wisata yang baik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemasukan negara, pemasukan daerah, maupun pendapatan masyarakat di daerah lokasi kawasan wisata. Peran kelembagaan pariwisata sendiri bergantung pada strategi yang direncanakan suatu kelembagaan dalam mengelola dan menata sistem maupun pengelolaan dalam mengadakan kegiatan pariwisata. Menurut Zaenal bahwa pemberdayaan kelembagaan dapat dilakukan dengan beberapa hal, antara lain (Choirinnisa, 2010):

- 1) meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah, meliputi peningkatan kelembagaan, perbaikan prosedur, dan peningkatan sumber daya manusia;
- 2) pemberdayaan menyangkut keterkaitan antar instansi; dan
- 3) pemberdayaan menyangkut keterkaitan dengan masyarakat.

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah kegiatan pariwisata, diantaranya penyediaan dan perbaikan sarana-prasarana, peningkatan peran serta masyarakat lokasi kawasan wisata, peran serta dari pihak swasta, kualitas pelayanan, dan menyebarluaskan promosi. Peran penting kelembagaan baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta berpengaruh pada jalannya kegiatan pariwisata dan peningkatan kegiatan pariwisata di lokasi kawasan wisata suatu daerah.

C. Hubungan Infrastruktur terhadap Kawasan Wisata

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur. Peranan pemerintah dalam menunjang peningkatan kerja suatu kelembagaan diperlukan pembangunan infrastruktur yang optimal (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi

umum secara meluas. Menurut Stone bahwa infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam ketersediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, dan fasilitas untuk tujuan ekonomi maupun sosial (Prasetyo dan Firdaus, 2009).

Infrastruktur merupakan keseluruhan fasilitas untuk menunjang pengembangan kegiatan pariwisata yang memudahkan proses pemenuhan kebutuhan berjalan dengan lancar, sehingga dapat melengkapi sarana dan prasarana kepariwisataan serta memberikan pelayanan dengan baik (Tondobala, 2012). Infrastruktur digolongkan menjadi beberapa kategori, antara lain: (i) infrastruktur fisik, meliputi jalan, rel kereta, jalur udara, jalur perairan, listrik, irigasi, suplai air, dan telekomunikasi; (ii) infrastruktur sosial, seperti sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas rekreasi; dan (iii) infrastruktur finansial, meliputi perbankan, pos, pajak, dan lain sebagainya. Infrastruktur merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan pengembangan suatu ekonomi negara. Menurut *World Bank* yang termasuk infrastruktur, antara lain (Valeriani, 2011):

- 1) *public utilities*, meliputi energi, telekomunikasi, suplai air, saluran limbah (selokan), dan lain sebagainya;
 - 2) *public work*, meliputi irigasi, jalan, transportasi, dan lain sebagainya;
 - 3) *administration public*, meliputi penegakan hukum, administrasi dan koordinasi.
- Sebagian negara berkembang lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana guna mempercepat pembangunan, proses tersebut antara lain jalan raya, irigasi, pembangkit listrik, dan telekomunikasi.

2.1.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan proses perjalanan waktu yang ditandai dengan perubahan struktural yakni adanya perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi terhadap masyarakat. Secara umum pembangunan akan diikuti dengan pertumbuhan, akan tetapi pertumbuhan tidak selalu diikuti dengan adanya pembangunan. Karakter pertumbuhan ekonomi yaitu proses bagaimana cara mencapai, siapa pelaku yang berperan serta, sektor-sektor

mana yang dapat diprioritaskan, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan mengatur, dan lain sebagainya, yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat (Todaro dan Smith, 2006:260). Pembangunan merupakan proses yang melibatkan struktur sosial, tingkah laku, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Proses pembangunan yang hambatan-hambatannya tidak mudah teratasi akan mempengaruhi mobilitas faktor produksi, seperti modal maupun tenaga kerja (Nurhuda dkk., 2013). Hal ini dapat berakibat pada modal dan tenaga kerja ahli yang cenderung terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju sehingga dapat terjadi ketimpangan pembangunan regional yang cenderung melebar. Proses pembangunan secara *sustainable* akan terus berlanjut, dengan adanya perbaikan prasarana dan fasilitas komunikasi akan mempengaruhi jalannya mobilitas modal dan tenaga kerja yang semakin lancar sehingga ketimpangan pembangunan regional dapat berkurang.

Menurut teori Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan proses yang harmonis, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus, yaitu terdapatnya gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada (Jhingan, 1992:158). Perkembangan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam lingkup industri dan perdagangan. Produksi artinya mengkombinasikan bahan-bahan dan tenaga yang dapat dicapai untuk menghasilkan barang dengan metode lain (inovasi). Bentuk inovasi antara lain:

- 1) mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru, ataupun barang-barang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen;
- 2) mengenalkan suatu metode produksi yang baru;
- 3) penemuan sumber-sumber ekonomi baru;
- 4) penguasaan sumber penawaran yang baru, baik berupa bahan mentah atau barang semi manufaktur; dan
- 5) adanya pembentukan organisasi baru.

A. Hubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Ekonomi

Otonomi daerah merupakan wewenang pemerintahan dalam mengatur urusan yang bersifat lokalistik dan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan (Muluk, 2009:62). Menurut Mustopadidjaja bahwa peran pemerintah dapat ditingkatkan melalui: (i) pengurangan hambatan dan kendala untuk menampung kreativitas dan partisipasi masyarakat; (ii) perluasan akses pelayanan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat; dan (iii) pengembangan program untuk meningkatkan dan memberikan kesempatan masyarakat dalam berperan aktif serta memanfaatkan sumber daya produktif yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riyadi dan Bratakusumah, 2004:333). Keberadaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dalam perencanaan daerah yang didapatkan dari data-data yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, beberapa simulasi kegiatan dan penentuan arah kebijakan pembangunan dapat dijalankan secara maksimal agar upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam proses pembangunan daerah dapat diatasi terlebih dahulu. Otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi daerah merupakan pilihan yang paling tepat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat yang demokratis dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sabarno, 2007:32). Otonomi daerah secara kesimpulannya merupakan kewenangan daerah dalam membuat keputusan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengapresiasi kepentingan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahapan dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, yang artinya dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses perencanaan pembangunan

untuk perubahan ke arah perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam daerah tertentu, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan bersifat menyeluruh serta mengutamakan pembangunan daerah (Riyadi dan Bratakusumah, 2004:07). Konsep umum dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis (Setianingsih dkk., 2015).

Tiga unsur pokok-pokok perencanaan pembangunan daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah, antara lain: (i) perencanaan pembangunan daerah yang realistik perlu pemahaman antara hubungan daerah dengan lingkungan nasional karena keterkaitan mendasar antara keduanya dan konsekuensi akhir yang ditimbulkannya; (ii) sesuatu yang terlihat baik bagi nasional belum tentu baik bagi daerah, dan begitu pun sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik bagi nasional; (iii) perangkat kelembagaan untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, pengambilan keputusan, otoritas, dan lain sebagainya berbeda antara tingkat daerah dengan tingkat pusat, maka perencanaan daerah yang efektif dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai. Menurut Blakely bahwa terdapat enam tahap proses perencanaan pembangunan daerah, antara lain (Kuncoro, 2004:46-49):

- 1) Pengumpulan dan analisis data, yaitu penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, dan analisis kapasitas kelembagaan.
- 2) Pemilihan strategi pembangunan daerah, yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan penyusunan target strategi.
- 3) Pemilihan proyek-proyek pembangunan, yaitu identifikasi proyek potensial dan penilaian kelayakan proyek.

- 4) Pembuatan rencana tindakan, yaitu prapenilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternatif sumber pembiayaan, dan identifikasi struktur proyek.
- 5) Penentuan rincian proyek, yaitu pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana bisnis, pengembangan, pemantauan, dan pengevaluasian program.
- 6) Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi, yaitu penyiapan jadwal implementasi rencana proyek, penyusunan rencana program pembangunan secara keseluruhan, target dan pemasaran aset-aset masyarakat serta pemasaran kebutuhan keuangan.

B. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Ekonomi

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena butuh perhatian yang lebih terhadap lingkungan, hal ini disebabkan oleh sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan atau terus menerus. Perilaku yang eksploitatif, destruktif, dan tidak peduli terhadap kelestarian alam akan melahirkan cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan secara individu yang dalam jangka panjang dapat merugikan manusia secara keseluruhan. Menurut Budimanta bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan cara pandang secara sistematis dan terencana dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan lingkungan serta memberi kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya yang ada (Rozikin, 2012). Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memperoleh keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada potensi sumber daya alam. Pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan, meliputi: (i) berkelanjutan ekonomi, artinya sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa diharapkan dapat memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan yang dapat mengganggu produksi pertanian dan industri; (ii) berkelanjutan lingkungan, artinya sistem berkelanjutan lingkungan diharapkan mampu memelihara sumber daya yang tersedia, menghindari eksploitasi sumber

daya alam yang berlebihan, dan menjaga fungsi ekosistem lainnya; (iii) berkelanjutan sosial, artinya sistem berkelanjutan sosial diharapkan mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pendekatan, antara lain: (i) pendekatan ekonomi, menekankan perolehan pendapatan yang berbasis pada efisiensi penggunaan sumber daya; (ii) pendekatan ekologi, menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati; (iii) pendekatan sosial, menekankan pemeliharaan keseimbangan sistem sosial budaya seperti penghindaran konflik keadilan dalam satu generasi maupun antar generasi (Naf, 2011).

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WECD) tahun 1987, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan ekonomi di suatu negara maupun daerah tertentu yang dikatakan berkelanjutan apabila sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah dipakai tidak berkurang dari waktu ke waktu (Naf, 2005). *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) tahun 1992, menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, antara lain (Azis dkk., 2010:127-132): (i) keadilan antargenerasi, artinya generasi sekarang tidak membebani kualitas hidup yang rendah atau eksternalitas negatif kepada generasi berikutnya, setiap generasi harus mampu mewarisi kekayaan sumber daya alam dan meneruskannya kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya akan memiliki peluang yang hampir setara secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; (ii) keadilan dalam satu generasi, termasuk menyorot adanya ketidakberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, adanya kesenjangan antara individu maupun kelompok masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup; (iii) prinsip pencegahan dini, artinya melakukan pencegahan dampak lingkungan agar tidak terjadi atau meminimalisir apabila terdapat ancaman terhadap kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan; (iv) perlindungan keanekaragaman hayati, prinsip ini mengutamakan pada pembangunan berkelanjutan karena sumber daya ekologis memberi pengaruh positif, seperti memberi makanan dan obat-obatan,

produk industri, menjaga kesuburan tanah, dan memberikan air bersih; (v) internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif, gagasan prinsip ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam, seperti peraturan, perizinan, biaya, dan lain sebagainya. Pembangunan kawasan wisata berkelanjutan menyangkut berbagai aspek, antara lain lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pembangunan kawasan wisata berkelanjutan memperhatikan daya dukung secara ekologis dalam jangka panjang, layak secara ekonomi, adil secara etika, dan memperhatikan sosial masyarakat. Pentingnya pengembangan kawasan wisata yang peduli terhadap kelestarian lingkungan akan berpengaruh terhadap pengembangan kawasan wisata berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian dengan tema sejenis yaitu pengembangan kawasan wisata. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hidayanto dkk (2009) dengan judul Analisis Keberlanjutan Perkebunan Kakao Rakyat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Kajian penelitian ini bertujuan untuk menilai indeks dan status keberlanjutan perkebunan kakao, mengidentifikasi faktor-faktor yang sensitif berpengaruh terhadap keberlanjutan perkebunan kakao, dan menyusun arahan kebijakan pengembangan perkebunan kakao rakyat di Pulau Sebatik. Alat analisis yang digunakan yaitu metode analisis yang digunakan yaitu *RAP-SEBATIK*, *leverage analysis*, dan analisis *monte carlo*. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa status keberlanjutan dimensi ekologi kurang berkelanjutan (46,23%), dimensi ekonomi kurang berkelanjutan (48,58%), dimensi dimensi sosial-budaya berkelanjutan (75,20%), dimensi infrastruktur dan teknologi kurang berkelanjutan (36,39%), dan dimensi hukum dan kelembagaan kurang berkelanjutan (40,49%).

Penelitian dengan tema sejenis selanjutnya dilakukan oleh Choirinnisa (2010) dengan judul Evaluasi Pendahuluan terhadap Aspek Fisik dan Kelembagaan Program Pengembangan Destinasi Percandian Muaro Jambi. Kajian

penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pendahuluan terhadap aspek fisik dan kelembagaan program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi. Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis *successive approximation* yang membandingkan antara data temuan dan teori untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi pada suatu realita sosial. Hasil dari penelitian yang dikaji oleh Choirinnisa menunjukkan bahwa program pengembangannya sudah cukup layak, ditandai dengan adanya pembagian kewenangan antara setiap organisasi, mekanisme koordinasi, dan dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah, namun masih diperlukan pengembangan secara konsisten mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Penelitian dengan tema sejenis selanjutnya dilakukan oleh Evita dkk (2012) dengan judul Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkembangan pembangunan sarana akomodasi wisata dan mengetahui strategi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan Bali di masa mendatang. Analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan interpretatif melalui beberapa proses, seperti verifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui dampak perkembangan sarana akomodasi wisata terhadap pariwisata berkelanjutan di Bali secara ekonomi meningkatkan PAD dengan adanya pembayaran pajak yang diterima pemerintah daerah dan berkembangnya sarana akomodasi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan atas pembangunan sarana akomodasi yaitu banyak lahan produktif untuk pertanian yang diubah menjadi tempat akomodasi wisata.

Penelitian dengan tema sejenis selanjutnya dilakukan oleh Setiawan (2015) dengan judul Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003-2014. Penelitian Setiawan bertujuan untuk menelusuri alasan, mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata sebagai industri serta melacak dampak adanya pariwisata bagi perekonomian Pemerintah Kabupaten Jember. Alat analisis yang digunakan oleh peneliti Setiawan yaitu metode sejarah yang terdiri

dari empat tahap, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitiannya adalah sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, pada tahun 2008 sumbangan sektor pariwisata sebesar 2,5 milyar dan selanjutnya pada tahun 2014 sumbangan sektor pariwisata sebesar 12 milyar.

Penelitian dengan tema sejenis selanjutnya dilakukan oleh Widyastuti (2016) dengan judul Strategi Pengembangan Obyek Wisata Rembangan di Kabupaten Jember. Penelitian Widyastuti bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengembangan Obyek Wisata Rembangan Kabupaten Jember. Alat analisis yang digunakan dalam penelitiannya yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, diantaranya perbaikan infrastruktur, aksesibilitas, dibentuknya kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dan kualitas pelayanan serta promosi. Persamaan antara penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah menganalisis pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian, sedangkan perbedaan antara penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya terletak pada metode dan alat analisis yang digunakan.

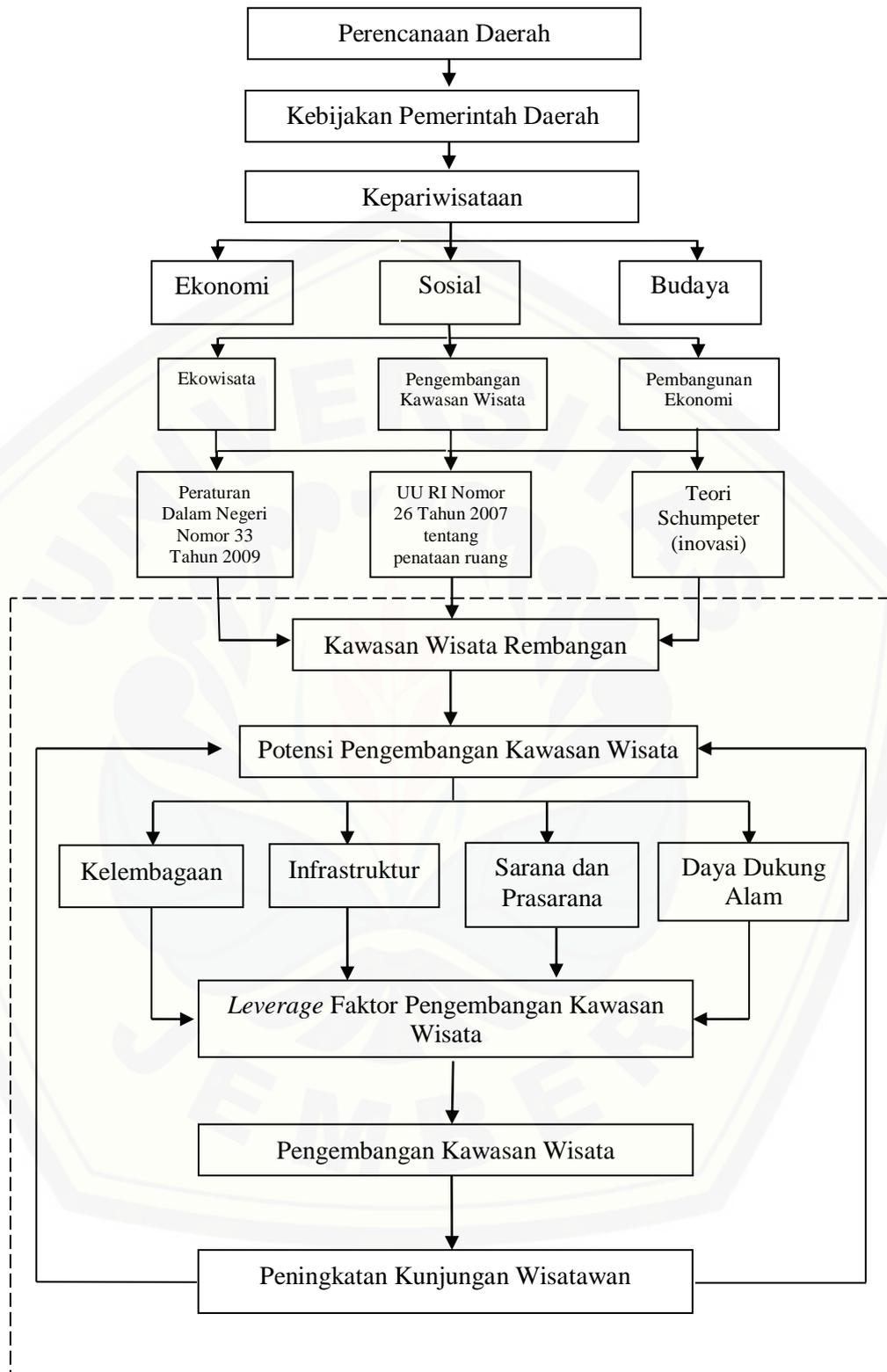
Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Peneliti Sebelumnya

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan	Alat Analisis	Hasil
1.	Hidayanto dkk., 2009	Analisis Keberlanjutan Perkebunan Kakao Rakyat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur	Untuk menilai indeks dan status keberlanjutan perkebunan kakao, mengidentifikasi faktor-faktor yang sensitif berpengaruh terhadap keberlanjutan perkebunan kakao, dan menyusun arahan kebijakan pengembangan perkebunan kakao rakyat di Pulau Sebatik.	Metode analisis yang digunakan yaitu <i>RAP-SEBATIK</i> , <i>leverage analysis</i> , dan analisis <i>monte carlo</i> .	Status keberlanjutan dimensi ekologi kurang berkelanjutan (46,23%), dimensi ekonomi kurang berkelanjutan (48,58%), dimensi dimensi sosial-budaya berkelanjutan (75,20%), dimensi infrastruktur dan teknologi kurang berkelanjutan (36,39%), dan dimensi hukum dan kelembagaan kurang berkelanjutan (40,49%).
2.	Choirinnisa, 2010	Evaluasi Pendahuluan terhadap Aspek Fisik dan Kelembagaan Program Pengembangan Destinasi Percandian Muaro Jambi	Untuk melakukan evaluasi pendahuluan terhadap aspek fisik dan kelembagaan program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi.	Teknik analisis <i>successive approximation</i> yang membandingkan antara data temuan dan teori untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi pada suatu realita sosial.	Program pengembangan sudah cukup layak, ditandai dengan adanya pembagian kewenangan antara setiap organisasi, mekanisme koordinasi, dan dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah, namun masih diperlukan pengembangan secara konsisten mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
3.	Evita dkk., 2012	Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali	Untuk mengetahui dampak perkembangan pembangunan sarana akomodasi wisata dan mengetahui strategi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan Bali di masa mendatang.	Analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan interpretatif melalui beberapa proses, seperti verifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Dampak secara ekonomi meningkatkan PAD dengan adanya pembayaran pajak yang diterima pemerintah daerah dan berkembangnya sarana akomodasi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan atas pembangunan sarana akomodasi yaitu banyak lahan produktif untuk pertanian yang diubah menjadi tempat akomodasi wisata.
4.	Setiawan, 2015	Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003-2014	Untuk menelusuri alasan, mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata sebagai industri serta melacak dampak adanya pariwisata bagi perekonomian Pemerintah Kabupaten Jember.	Analisis metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.	Sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, pada tahun 2008 sebesar 2,5 milyar, dan di tahun 2014 sumbangan sektor pariwisata sebesar 12 milyar.
5.	Widyastuti, 2016	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Rembangan di Kabupaten Jember	Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengembangan Obyek Wisata Rembangan Kabupaten Jember.	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.	Strategi yang dilakukan diantaranya perbaikan infrastruktur, aksesibilitas, dibentuknya kelompok sadar wisata atau POKDARWIS dan kualitas pelayanan serta promosi.

Sumber: Hidayanto dkk (2009), Choirinnisa (2010), Evita dkk (2012), Setiawan (2015), Widyastuti (2016)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang dilakukan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dari penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan bahwa perencanaan daerah dimiliki pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan tentang kepariwisataan di suatu daerah. Kepariwisataan sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Landasan teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian antara lain ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, pengembangan kawasan wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan pembangunan ekonomi menurut teori Schumpeter (inovasi). Garis putus-putus menyerupai bentuk kotak menggambarkan bahwa sorotan penelitian yaitu pada kawasan wisata Rembangan. Pengembangan kawasan wisata Rembangan dipengaruhi faktor dan peran kelembagaan, infrastruktur, sarana dan prasarana serta daya dukung alam dalam pengembangan kawasan wisata Rembangan. Adanya pengaruh dari empat faktor tersebut dapat mempengaruhi *leverage* faktor sebagai kunci yang tentunya berpengaruh pada pengembangan kawasan wisata Rembangan. Pengembangan kawasan wisata Rembangan akan berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisatawan, meningkatnya jumlah wisatawan dapat memberi dampak pada potensi pengembangan kawasan wisata Rembangan. Untuk lebih memperjelas kerangka berpikir, maka peneliti akan menyajikannya dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjelasan bagian dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif merupakan gambaran mengenai situasi ataupun kejadian, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan analisis data yang dapat dihitung untuk memperoleh hasil penafsiran, sehingga memberikan informasi dalam membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian (Hikmat, 2011:41-44).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi analisis penelitian yaitu kawasan wisata Rembangan yang letaknya di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dan memiliki potensi wisata, yaitu *something to see, something to do, something to buy* serta *something to learn*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui serta mendeskripsikan pengembangan kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Mei 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder agar data yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi penulis.

A. Data Primer

Pengambilan data primer berupa survei lapangan yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Pengumpulan data diperoleh melalui turun langsung ke lokasi penelitian yang dilakukan untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Data primer yang dimaksudkan adalah data mengenai pengembangan Kawasan Wisata Rembangan di Kabupaten Jember.

B. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder diperoleh melalui pihak-pihak lain yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hal ini dapat berupa teknik pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dari menelaah buku, majalah atau surat kabar, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan bentuk tulisan lainnya yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang mendukung penulis dalam melengkapi data primer yang diperoleh, seperti data pengunjung, data lokasi, data penerimaan pendapatan, dan data-data yang berkaitan lainnya. Instansi yang dapat membantu dalam memperoleh data sekunder, diantaranya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rembangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

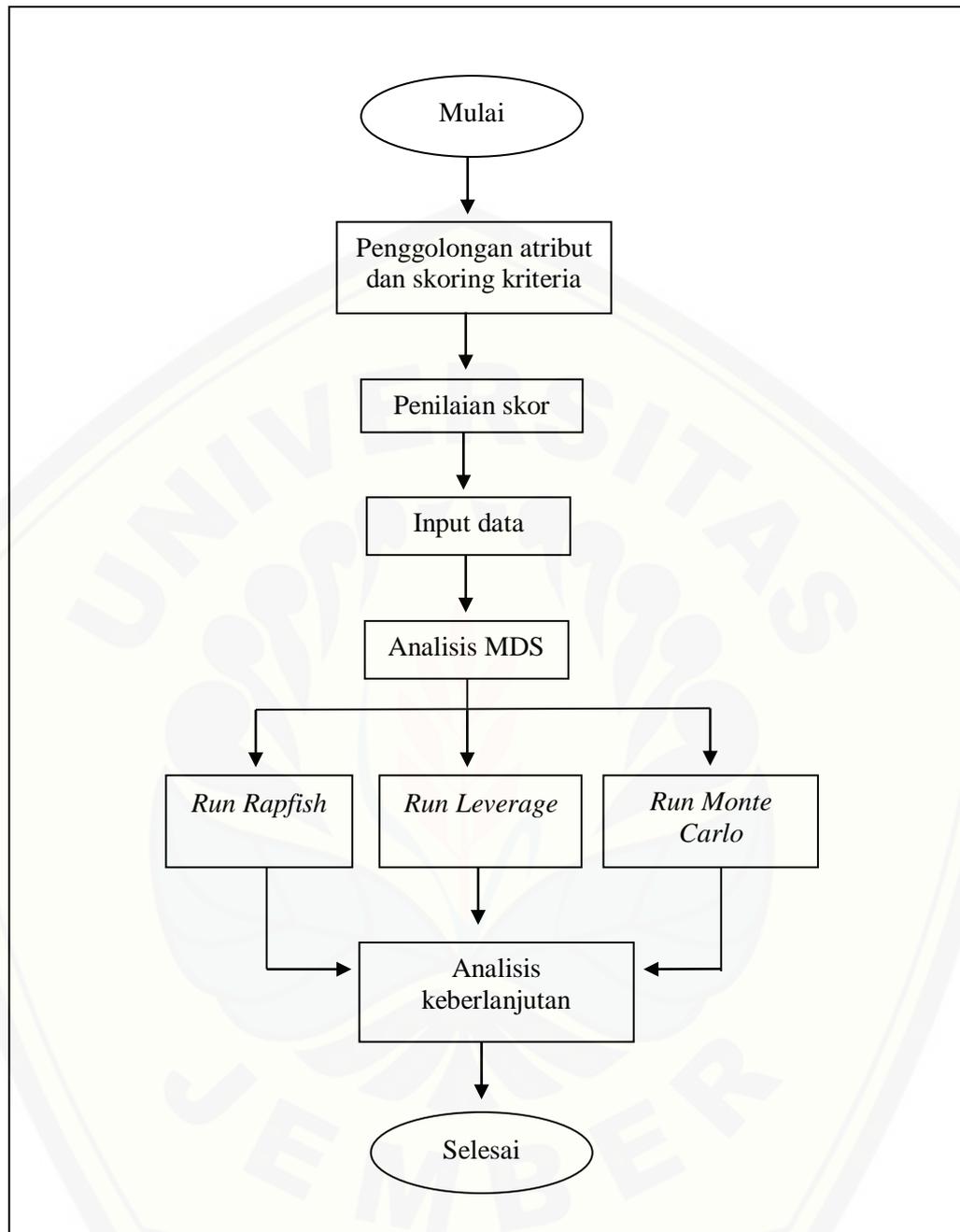
3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal vital dalam penelitian (Bungin, 2013:129). Penulis harus mampu mengetahui sumber data yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data akan diperoleh penulis dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi kawasan wisata Rembangan dengan memperoleh informasi yang didapatkan dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk

kuesioner kepada responden. Penentuan sumber data dan informasi dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik penentuan responden menggunakan *snowball sampling*, yang artinya dalam penentuan responden diawali jumlah yang kecil kemudian mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai responden lainnya, sehingga mencapai jumlah responden yang menjadi responden tambahan (Hikmat, 2011:65). Responden dalam penelitian ini adalah para pihak dan pemangku kepentingan terhadap lokasi kawasan wisata Rembangan, di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, seperti penduduk yang berwirausaha di sekitar kawasan wisata Rembangan, UPTD Rembangan yang berada di puncak Rembangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.4 Desain Penelitian

Gambar 3.1 tentang desain penelitian menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Langkah pertama yaitu penggolongan atribut dan menentukan skor atau nilai pada atribut. Langkah selanjutnya, pemberian skor atas perolehan informasi dari sumber-sumber terkait (penduduk yang berwirausaha di sekitar kawasan wisata Rembangan, UPTD Rembangan yang berada di puncak Rembangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember). Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data dari hasil perolehan informasi dan skor yang telah diketahui, lalu mengolah data dengan metode analisis multidimensional *scaling* (MDS). Analisis MDS menggunakan beberapa *running* aplikasi, yaitu *run rapfish*, *run leverage*, dan *run monte carlo*. Tahap berikutnya yaitu melakukan analisis dimensi keberlanjutan, dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor yang harus dipertahankan dan bagaimana keberlanjutannya.



Gambar 3.1 Desain Penelitian (Sumber: Penulis, 2017)

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Penelitian Lapangan

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Bungin, 2013:142). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data yang relevan, baik melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode angket atau kuesioner merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari responden dalam bentuk pernyataan tertulis yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti (Hikmat, 2011:77).

3.5.2 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan dalam pelaksanaannya penulis menggunakan literatur yang sudah ada.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis MDS. Analisis MDS merupakan analisis yang menggunakan tiga komponen, yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. Penelitian terhadap tiga komponen tersebut dilakukan untuk keberlanjutan pembangunan dimensi lainnya, yaitu dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur dan teknologi. Adapun tahapan analisis MDS sebagai berikut (Nurmalina, 2008):

- 1) penentuan atribut-atribut dimensi lingkungan, ekonomi, maupun sosial serta atribut-atribut dari setiap dimensi berikutnya ditentukan oleh penetapan awal dari hasil wawancara dan survei;
- 2) penilaian setiap atribut dalam skala ordinal untuk mengetahui keberlanjutan di setiap dimensi;
- 3) penyusunan indeks dan status keberlanjutan pada lokasi kawasan penelitian berdasarkan skor yang telah diperoleh. Kategori tingkat keberlanjutan, yaitu:

- (i) tidak berkelanjutan dengan skor ≤ 25 ; (ii) kurang berkelanjutan dengan skor 25-50; (iii) cukup berkelanjutan dengan skor 50-75; (iv) berkelanjutan dengan skor 75-100;
- 4) penentuan atribut-atribut pengungkit sensitif di setiap dimensi, atribut sensitif yaitu atribut yang memiliki peran besar dan dominan dalam menentukan nilai indeks tingkat keberlanjutan di setiap dimensi tersebut.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Rapfish* yang terpasang pada modus *add-ins* pada aplikasi *microsoft excel*. Terdapat tiga hal *running* program aplikasi, yaitu *run rapfish*, *run leverage*, dan *run monte carlo* (Nurmalina, 2008).

A. *Run Rapfish*

Run rapfish yang dimodifikasi menjadi *Rap*-Rembangan digunakan untuk menentukan posisi keberlanjutan di setiap dimensi yang dikaji. Aplikasi ini menerapkan dua titik acuan, yaitu titik “baik” (*good*) dan titik “buruk” (*bad*). Titik acuan ini bertujuan untuk membantu penetapan posisi keberlanjutan yang akan sulit mengingat terdapatnya banyak atribut pada dimensi yang ada. MDS berfungsi melakukan standarisasi nilai skor untuk setiap atribut sehingga di setiap atribut memiliki bobot yang seragam dan perbedaan antarskala pengukuran dapat dihilangkan.

B. *Run Leverage*

Run leverage digunakan untuk mengukur atribut dalam penelitian dan dimunculkan dalam urutan besaran nilai *leverage*. Besaran nilai *leverage* menjadi dasar untuk menetapkan atribut faktor pengungkit atau faktor kunci di setiap dimensi. Faktor tingkat ketelitian dalam penelitian ini dapat dilihat dengan cara melakukan *run monte carlo*.

C. *Run Monte Carlo*

Run monte carlo merupakan metode stimulasi statistik dalam pengevaluasian efek dari suatu *random error* pada proses dan memperkirakan

tingkat kepercayaan dari suatu pengukuran. Analisis ini digunakan untuk memahami: (i) kesalahan dalam pembuatan skor di setiap atribut, (ii) ragam pemberian skor akibat perbedaan opini, (iii) kestabilan proses analisis yang dilakukan berulang, dan (iv) kesalahan pemasukan data.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel di dalam penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Pengembangan kawasan wisata, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dimensi yang berpengaruh terhadap pengembangan dan keberlanjutan kawasan wisata Rembangan.
- 2) Dimensi ekologi memiliki 11 atribut keberlanjutan, antara lain: kondisi dan kualitas kawasan wisata Rembangan, luas sebaran lahan hijau, kuantitas pertumbuhan tanaman hijau di dataran tinggi, ketersediaan dan kualitas air, tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah, frekuensi terjadinya kekeringan, program pelestarian dan penataan lahan hijau, pemanfaatan usaha terhadap kawasan wisata, perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kawasan wisata, pelaksanaan rehabilitasi lahan, dan penerapan aturan dan pajak lingkungan terhadap penggunaan lahan kawasan wisata Rembangan (Hidayanto dkk., 2009).
- 3) Dimensi ekonomi terdiri dari 9 atribut keberlanjutan, antara lain: penciptaan peluang usaha, pengaruh terhadap pendapatan masyarakat, pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta, nilai ekonomi lahan yang menjadi kawasan wisata, aktivitas ekonomi pasca pembangunan kawasan wisata, kontribusi pembangunan kawasan wisata terhadap PAD, program pengembangan masyarakat untuk mendorong tata kelola kawasan wisata, biaya pemulihan kerusakan lingkungan, dan program ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan wisata (Hidayanto dkk., 2009).
- 4) Dimensi sosial terdiri dari 9 atribut keberlanjutan, antara lain: tingkat penyerapan tenaga kerja, frekuensi konflik kesenjangan, hubungan masyarakat

sekitar dengan pelaku pengelola kawasan wisata, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, pengaruh pembangunan kawasan wisata terhadap nilai sosial-budaya masyarakat, pengaruh terhadap peningkatan pendidikan, kesadaran masyarakat untuk perbaikan lingkungan, persepsi masyarakat terhadap keberadaan pengembangan kawasan wisata serta tingkat keseriusan dan kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengembangan kawasan wisata (Hidayanto dkk., 2009).

- 5) Dimensi hukum dan regulasi terdiri dari 10 atribut keberlanjutan, antara lain: ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan lingkungan, kepatuhan dalam memenuhi dan menjaga lingkungan hidup, penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan, konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat, konflik antara pemegang usaha dengan para pihak, kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan, permasalahan ganti rugi lahan, kepastian hukum dalam menjalankan usaha, dan penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan (Hidayanto dkk., 2009).
- 6) Dimensi kelembagaan terdiri dari 8 atribut keberlanjutan, antara lain: bagaimana susunan dan manajemen kelembagaan pengelola wisata, kinerja sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kawasan wisata, peran lembaga pemerintah terhadap pengelolaan kawasan wisata, cara dan strategi pengelola dalam menarik wisatawan, cara pengelola dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi, strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan kawasan wisata, keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata, dan peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan monitoring, dan evaluasi (Hidayanto dkk., 2009).
- 7) Dimensi infrastruktur dan teknologi terdiri dari 8 atribut keberlanjutan, antara lain: pemahaman tentang proses promosi dan pengembangan usaha, teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan, teknik konservasi lahan, keberadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kawasan wisata Rembangan, teknik pengelolaan pembangunan bangunan yang baik, pengawasan rutin oleh

pemerintah terhadap kegiatan usaha, keberadaan SDM pengawas dalam tata kelola usaha, dan keberadaan program dan teknik pengembangan usaha (Hidayanto dkk., 2009).



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara umum, pengembangan kawasan wisata Rembangan dipengaruhi oleh faktor ekologi (lingkungan), ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan serta infrastruktur dan teknologi. Faktor sosial, ekologi, dan ekonomi merupakan faktor yang lebih berpengaruh dalam pengembangan kawasan wisata Rembangan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi). Adapun kendala-kendala yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata Rembangan, seperti rendahnya SDM, perlunya peningkatan sarana-prasarana untuk menunjang dan mendukung pengembangan kawasan wisata Rembangan, serta perlunya peningkatan kecintaan terhadap budaya yang dimiliki agar bisa ditunjukkan pada dunia luar atau wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Rembangan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penasehat atas kebijakan mengenai perkembangan pariwisata, khususnya kawasan wisata Rembangan terus melakukan promosi dan mengajak masyarakat setempat untuk ikut berperan dalam menciptakan sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Fungsi sapta pesona adalah untuk meminimalisir dan mempermudah pengendalian dampak lingkungan, sehingga masyarakat setempat dapat memiliki kesadaran akan wisata yang tinggi guna menjaga kestabilan keamanan bagi pengunjung maupun masyarakat kawasan wisata Rembangan. Pemerintah Kabupaten Jember memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat setempat guna meningkatkan sumberdaya masyarakat setempat yang dilakukan dengan cara pemberian materi maupun mengajak masyarakat setempat yang bekerja di UPTD Rembangan untuk mengikuti pelatihan di luar atau pun di dalam kotaJember.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dikembangkan secara berkelanjutan yang bertujuan masyarakat setempat atau pelaku usaha untuk memiliki inovasi yang dapat

menciptakan nilai tambah sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelola kawasan wisata maupun masyarakat setempat. Pengembangan kawasan wisata Rembangan dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah setempat dan menciptakan lapangan usaha atau pekerjaan bagi masyarakat setempat. Status berkelanjutan pengembangan kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember dimensi ekologi adalah berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 77,29, dimensi ekonomi adalah berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 75,85, dimensi sosial adalah berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 80,67, dimensi hukum dan regulasi adalah cukup berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 64,76, dimensi kelembagaan adalah cukup berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 66,74, serta dimensi infrastruktur dan teknologi adalah cukup berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 66,82. Status dan kondisi berkelanjutan menunjukkan bahwa kawasan wisata Rembangan memiliki potensi dalam pengembangannya yang juga perlu memperhatikan strategi pengembangan dari pemerintah daerah maupun masyarakat, seperti sarana dan prasarana (infrastruktur, aksesibilitas dan akomodasi, serta atraksi), peran masyarakat, peran pihak swasta, maupun promosi yang perlu digencarkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kawasan wisata Rembangan, antara lain:

- 1) Bagi masyarakat setempat, khususnya pelaku usaha di sekitar kawasan wisata Rembangan hendaknya lebih memperhatikan atau lebih sadar pentingnya tingkat pendidikan baik secara formal maupun informal, agar terbentuk SDM yang kreatif dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan demi kemajuan ekonomi masyarakat setempat dan pengembangan kawasan wisata Rembangan.
- 2) Bagi pihak swasta, perlunya peningkatan partisipasi maupun peran pihak swasta atau investor dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Rembangan,

misalnya dalam bentuk fasilitas dana maupun pembangunan hotel dan infrastruktur lainnya.

- 3) Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, lebih meningkatkan cara dan strategi dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember, baik dari segi sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat setempat, peran pihak swasta, maupun promosi yang harus terus ditingkatkan agar wisatawan yang berkunjung dapat meningkat setiap tahunnya.
- 4) Bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA*. 7(2): 102-109.
- Azis, I. J., L. M. Napitupulu., A. A. Patunru., dan B. P. Resosudarmo. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kementerian, dan Kementerian Pariwisata. 2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata 2015*. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chatamallah, M. 2008. Strategi “*Public Relations*” dalam Promosi Pariwisata: Studi Kasus dengan Pendekatan “*Marketing Public Relations*” di Provinsi Banten. *Jurnal Mediator*. 9(2): 393-402.
- Choirinnisa, S. 2010. Evaluasi Pendahuluan terhadap Aspek Fisik dan Kelembagaan Program Pengembangan Destinasi Percandian Muaro Jambi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. 17(2): 170-182.
- David, F. 2009. *Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Evita, R., I. N. Shirta., dan I. N. Sunartha. 2012. Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 2(1): 109-222.
- Hasibuan, M. S. P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hiariey, L. S., W. Sahunilawane. 2013. Dampak Pariwisata terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha di Kawasan Pantai Natsepa Pulau Ambon. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 9(1): 87-105.
- Hidayanto, M., S. Supiandi., S. Yahya., dan L. I. Amien. 2009. Analisis Keberlanjutan Perkebunan Kakao Rakyat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*. 27(2): 213-229.

- Hikmat, M. M. 2011. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hilma, R. 2013. Peran Pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Lapangan Golf Kintamani dengan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan. *Binus Business Review*. 4(1): 283-289.
- Idris., Y. Ramel. 2007. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: FE UNP.
- Jhingan, M. L. 1992. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan Edisi Ke-16*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kete, S. C. R. 2016. *Pengelolaan Ekowisata Berbasis Goa Wisata Alam Goa Pindul*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kesek, F. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. 1(4): 1922-1933.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung, H. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk., M. R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Mulyadi, E., N. Fitriani. 2010. Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*. 2(1): 11-18.
- Naf, J. A. 2005. Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya Untuk Indonesia. *Jurnal FISIP Madani*. 2(2): 46-55.
- Naf, J. A. 2011. Tinjauan Analitis terhadap Model Pembangunan Indonesia. *Jurnal Kybernan*. 2(1): 69-82.
- Nawawi, H. 2005. *Metode Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhuda, R., Muluk., dan W. Y. Prasetyo. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(4): 110-119.

- Nurmalina, R. 2008. Analisis Indeks dan Status Keberlanjutan Sistem Ketersediaan Beras di Beberapa Wilayah Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. 26(1): 47-79.
- Pemerintah Kabupaten Jember Kantor Pariwisata dan Kebudayaan. 2016. *Buku Database Informasi Pariwisata*. Jember.
- Pendit, N. S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prasetyo, R. B., M. Firdaus. 2009. Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 2(2): 222-236.
- Primardany, S. R., Mardiyono., dan Riyanto. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(4): 135-143.
- Riyadi., D. S. Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rozikin, M. 2012. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu. *Jurnal Review Politik*. 2(2): 219-243.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria, D. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*. 3(1): 37-47.
- Setianingsih, B., E. Setyowati., dan Siswidyanto. 2015. Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(11): 1930-1936.
- Setiawan, A. Y. 2015. Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003-2014. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Siagian, S. P. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Slamet, I. W. A., I. N. Sudiarta., dan I. W. Suardana. 2015. Persepsi Wisatawan terhadap Aksesibilitas dari Penelokan menuju Objek Wisata Toya Bungkah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal IPTA*. 3(1): 1-5.
- Subijanto, 2011. Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 17(6): 705-718.
- Surwiyanta, A. 2003. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi. *Media Wisata*. 2(1): 33-42.
- Syarif, M. 2013. Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam. *Media Akademika*. 28(3): 333-362.
- Todaro, M. P., Smith. S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke-9*. Jakarta: Erlangga.
- Tondobala, L. 2012. Kelayakan Pusat Kota Manado sebagai Destinasi Pariwisata. *Media Matrasain*. 9(3): 82-103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. *Buku Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta.
- Valeriani, D. 2011. Analisis Pengaruh Kebijakan Infrastruktur terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Equity*. 1(5): 1-19.
- Wardiyanto. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Wibisono, D. 2006. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga.
- Widyastuti, A. R. 2016. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Rembangan di Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Yoeti, O. A. 2005. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, O. A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.

Internet

Kementerian Dalam Negeri. 2007. <http://www.kemendagri.go.id/>. Diakses pada 22 April 2017.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2017. <https://jemberkab.go.id/>. Diakses pada 25 Januari 2017.

Pariwisata Kabupaten dan Kota Jember Jawa Timur. 2017. <http://www.eastjava.com/tourism/jember/ina/>. Diakses pada 02 Maret 2017.



Lampiran 1. Gambaran Umum Responden

Masyarakat Desa Kemuning Lor				
No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1.	Srini	32	SMP	Wirausaha
2.	Dewwi	35	SD	Wirausaha
3.	Rifah	40	SD	Wirausaha
4.	Hol	55	SD	Wirausaha
5.	Agustin	25	SMP	Wirausaha
6.	Ratna	41	SMP	Wirausaha
7.	Wahyudi	35	SMA	Wirausaha
8.	Suryono	30	SMP	Wirausaha
9.	Lasdi	34	SD	Wirausaha
10.	Latifah	37	SMP	Wirausaha
11.	Maksum	29	SMP	Wirausaha
12.	Nanang	35	SMA	Wirausaha
13.	Sunaryo	65	SD	Wiraswasta
UPTD Wisata Rembangan				
No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1.	Achmad Yasin	47	SMA	Karyawan
2.	Lejar Handayani	35	SMA	Karyawan
3.	Hermanto	37	SMA	Karyawan
4.	Suoenno Riyadi	44	Sarjana	PNS
5.	Bambang Wahyudi	37	SMA	Karyawan
6.	Saleh	58	Sarjana	PNS
7.	Muklis	37	Sarjana	PNS
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1.	Yungry	35	Diploma	PNS
2.	Syaiful Amri	45	Diploma	PNS
3.	Job	40	Sarjana	PNS
4.	Frans	34	Diploma	PNS
5.	Andika	37	Sarjana	PNS
6.	Menik	39	Sarjana	PNS
7.	Hartanto	46	Sarjana	PNS
8.	Isdianto	35	SMA	Wiraswasta
9.	Argo	36	Diploma	PNS
10.	Endi	34	Diploma	PNS
11.	Siti	37	Diploma	PNS
Badan Pendapatan Daerah				
No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1.	Agus	52	Sarjana	PNS
2.	Kukuh	49	Diploma	PNS
3.	Indah	31	Sarjana	PNS
4.	Hendra	33	Sarjan	PNS
5.	Tjahyo	40	Sarjana	PNS
6.	Mega	30	Sarjana	PNS
7.	Dewi	46	Sarjana	PNS
8.	Luluk	35	Diploma	PNS

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

Kuesioner Status Keberlanjutan
Potensi Pengembangan Kawasan
Wisata Rembangan

Kepada yth:

Bapak/Ibu/Saudara

di tempat

Saya sangat berharap Bapak/Ibu/Saudara dapat membantu saya dengan berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengisi kuesioner terlampir. Penelitian yang dilakukan terkait dengan status keberlanjutan potensi pengembangan kawasan wisata Rembangan di Kabupaten Jember. Semua data, informasi dan identitas Bapak/Ibu/Saudara dijamin kerahasiannya. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan penelitian dan penulisan skripsi saya.

Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

IDENTITAS RESPONDEN		No.....
1.	Nama Pekerjaan Alamat	
2.	RT/RW Desa/kelurahan Kecamatan Kab/Kota	
3.	Umur	
4.	Jenis Kelamin	Laki –laki / Perempuan
5.	Tingkat pendidikan	1). SD 2). SMP 3). SMU 4). Diploma 5). Sarjana 6). Lainnya.....
6.	Status lingkungan di permukiman	: Lestari (hijau) / Kering tandus / lain2:
7.	Apakah kegiatan pengelolaan kawasan wisata Rembangan menetapkan motif ekonomi	: Ya : Tidak
8.	Apakah pemerintah daerah menerapkan etika dalam pembangunan kawasan wisata	: Ya : Tidak
9.	Apakah pembangunan dan pengembangan dilakukan dengan menjagakelestarian lingkungan	: Ya : Tidak
10.	Apakah pemerintah daerah telah melakukan kebijakan sesuai dgn tata kelola yg berlanjut	: Ya : Tidak

KUESIONER ANALISIS STATUS KEBERLANJUTAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA REMBANGAN

Petunjuk pengisian kuesioner untuk Analisis Status Keberlanjutan:

1. Terdapat 5 variabel (ekologi; ekonomi; sosial; hukum dan regulasi; kelembagaan; serta infrastruktur dan teknologi). Masing-masing dimensi memiliki atribut dan kriteria masing-masing.
2. Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk mengisi skor pada ujung kanan matrik pertanyaan, yaitu: 0, 1,2, atau 3.
3. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kecil skor maka dampaknya semakin buruk/berat, maka skor 0 adalah dampak terburuk/berat dan semakin tinggi nilainya (1,2 atau 3) maka dampaknya semakin baik (positif).
4. Agar diisi sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara.

A. Variabel Ekologi (Lingkungan)

Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1 Kondisi dan kualitas kawasan wisata Rembangan	(0) Sangat berat, tanah lapisan atas tidak ada yang ditumbuhi tanaman hijau; (1) Berat, tanah lapisan atas sedikit yang ditumbuhi tanaman hijau; (2) Sedang, sebagian besar tanah cukup banyak ditumbuhi tumbuhan hijau; (3) Ringan, mayoritas tanah ditumbuhi tumbuhan hijau.	
2 Luas sebaran lahan hijau	(0) Luas lahan hijau luas tetapi kering dan tidak subur; (1) Luas lahan hijau terbatas; (2) Luas lahan dengankesuburan terbatas; (3) Luas lahan subur tersebar merata.	
3 Kuantitas pertumbuhan tanaman hijau didataran tinggi	(0) Tanaman hijau sulit tumbuh pasca pembangunan kawasan wisata; (1) Tanaman hijau sangat sedikit yang tumbuh pasca pembangunan kawasan wisata; (2) Sedikit pertumbuhan tanaman hijau pada wilayah pasca pembangunan kawasan wisata; (3) Tanaman hijau dan tanaman lain mudah tumbuh pada wilayah pasca pembangunan kawasan wisata.	
4 Ketersediaan dan kualitas air	(0) Tidak tersedia air; (1) Tersedia air dengan kualitas dan debit terbatas; (2) Terdapat air dengan kualitas sedang; (3) Terdapat air dengan kualitas bagus.	

5	Tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah	(0) Berat, yaitu struktur lahan terbatas/rusak berat/hancur dan produktivitas tanahnya menurun; (1) Menengah, yaitu struktur lahan rusak berat/hancur, namun produktivitas tanahnya tidak menurun; (2) Sedang, yaitu suatu ekosistem sedikit terganggu; (3) Ringan, yaitu struktur suatu ekosistem tidak terganggu.
6	Frekuensi terjadinya kekeringan	(0) Sangat sering; (1) Sering; (2) Jarang; (3) Tidak pernah
7	Program pelestarian dan penataan lahan hijau	(0) Tidak ada; (1) Ada tapi tidak berjalan dengan baik; (2) Ada dan berjalan dengan baik; (3) Ada dan berjalan dengan sangat baik.
8	Pemanfaatan usaha terhadap kawasan wisata	(0) Hampir tidak ada; (1) Sedikit; (2) Cukup tinggi; (3) Tinggi.
9	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kawasan wisata	(0) Sangat besar mengabaikan kelestarian alam; (1) Cukup besar mengabaikan kelestarian alam; (2) Tidak ada pengaruh dalam menjaga kelestarian alam; (3) Memiliki dampak positif, sangat menjaga dan peduli terhadap kelestarian alam.
10	Pelaksanaan rehabilitasi lahan	(0) Sangat sedikit; (1) Sedikit; (2) Cukup banyak; (3) Semua melakukan.
11	Penerapan aturan dan pajak lingkungan terhadap pengguna lahan kawasan wisata Rembangan.	(0) Sangat sedikit yang mematuhi; (1) Sedikit yang mematuhi; (2) Cukup banyak yang mematuhi; (3) Semua mematuhi

B. Variabel Ekonomi

	Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1	Penciptaan peluang usaha baru	(0) Tidak ada; (1) Ada, sangat sedikit; (2) Ada, sedikit; (3) Ada, banyak.	
2	Pengaruh terhadap pendapatan masyarakat	(0) Menurunkan pendapatan; (1) Tidak berpengaruh; (2) Berpengaruh tapi hanya meningkatkan sedikit; (3) Berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan masyarakat.	
3	Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta	(0) Menurunkan pendapatan; (1) Tidak berpengaruh; (2) Berpengaruh tapi hanya meningkatkan sedikit; (3) Berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan perusahaan.	

4	Nilai ekonomi lahan yg menjadi kawasan wisata	(0) Amat rendah; (1) Rendah; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.
5	Aktivitas ekonomi pasca pembangunan kawasan wisata	(0) Hampir tidak ada aktivitas ekonomi; (1) Ada, namun sangat sedikit; (2) Ada, namun sedikit; (3) Aktivitas ekonomi pasca pembangunan banyak.
6	Kontribusi pembangunan kawasan wisata terhadap PAD	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.
7	Program pengembangan masyarakat untuk mendorong tata kelola kawasan wisata	(0) Tidak ada program untuk pendorong tatakelola; (1) Sangat sedikit perusahaan memiliki program tata kelola; (2) Sedikit perusahaan yang memiliki program tata kelola; (3) Semua perusahaan memiliki program tata kelola.
8	Biaya pemulihan kerusakan lingkungan	(0) Sedikit; (1) Sedang; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.
9	Program ekonomi untuk masyarakat sekitar	(0) Sangat sedikit, program amat tidak memadai; (1) Sedikit program yang memadai; (2) Cukup banyak yang memadai; (3) Banyak program yang saesuai dan memadai.

C. Variabel Sosial

	Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1	Tingkat penyerapan tenaga kerja	(0) Tidak ada; (1) Ada, sangat sedikit; (2) Ada, sedikit; (3) Ada, banyak.	
2	Frekuensi konflik kesenjangan	(0) Tinggi; (1) Sedikit; (2) Sangat sedikit; (3) Tidak ada.	
3	Hubungan masyarakat sekitar dengan pelaku pengelola kawasan wisata	(0) Sangat tidak harmonis; (1) Tidak serasi/harmonis; (2) Agak serasi/harmonis; (3) Cukup serasi dan saling menguntungkan.	
4	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial	(0) Tidak ada; (1) Ada tetapi tidak berjalan; (2) Kurang optimal; (3) Optimal.	
5	Pengaruh pembangunan kawasan wisata terhadap nilai sosial-budaya masyarakat	(0) pengaruh buruk; (1) sedikit pengaruh buruk; (2) tidak ada pengaruh; (3) memberikan pengaruh baik.	
6	Pengaruh terhadap peningkatan pendidikan	(0) Tidak ada; (1) Sedikit;	

7	Kesadaran masyarakat untuk perbaikan lingkungan	(2) Cukup tinggi; (3) Tinggi. (0) Rendah; (1) Sedang; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi
8	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan pengembangan kawasan wisata	(0) Amat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.
9	Tingkat keseriusan dan kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengembangan kawasan wisata	(0) Tidak serius dan tidak peduli dengan keluhan masyarakat; (1) Sedikit serius dalam menangani permasalahan sosial akibat pembangunan kawasan wisata; (2) Cukup serius dalam menangani permasalahan sosial akibat pembangunan kawasan wisata; (3) Serius untuk memperhatikan keluhan dan masalah sosial yang timbul.

D. Variabel Hukum dan Regulasi

	Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1	Ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan lingkungan	(0) Tidak ada; (1) Sangat sedikit aturan; (2) Sedikit ada aturan; (3) Aturan sudah memadai.	
2	Kepatuhan dalam memenuhi dan menjaga lingkungan hidup	(0) Semua tidak patuh; (1) Sebagian besar tidak patuh; (2) Sedikit yang tidak patuh; (3) Semua patuh.	
3	Penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan	(0) Tidak ada; (1) Ada dalam frekuensi yang kurang; (2) Ada dalam frekuensi yang cukup; (3) Ada dan menjangkau secara keseluruhan.	
4	Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.	
5	Konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat	(0) Banyak dan sering terjadi; (1) Cukup sering terjadi; (2) Jarang terjadi; (3) Tidak terjadi.	
6	Konflik antara pemegang usaha dengan para pihak	(0) Banyak dan sering terjadi; (1) Cukup sering terjadi; (2) Jarang terjadi; (3) Tidak terjadi.	
7	Kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan usaha yang berawawasan lingkungan	(0) Tidak ada; (1) Ada tapi belum memadai; (2) Ada tapi belum terimplementasi dengan baik; (3) Ada dan sudah terimplementasi dengan baik.	
8	Permasalahan ganti rugi	(0) Banyak dan sering terjadi;	

	lahan	(1) Sangat sedikit terjadi; (2) Sedikit terjadi; (3) tidak terjadi.
9	Kepastian hukum dalam menjalankan usaha	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.
10	Penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.

E. Variabel Kelembagaan

	Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1	Bagaimana susunan dan manajemen kelembagaan pengelola wisata	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	
2	Kinerja Sumber Daya Manusia dalam mengelola kawasan wisata	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	
3	Peran lembaga pemerintah terhadap pengelolaan kawasan wisata	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	
4	Cara dan strategi pengelola dalam menarik wisatawan	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	
5	Cara pengelola dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi	(0) Sangat Buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	
6	Strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan kawasan wisata	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	
7	Keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi.	
8	Peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan, monitoring dan evaluasi	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik; (3) Baik.	

F. Variabel Infrastruktur dan Teknologi

Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1 Pemahaman tentang proses promosi dan pengembangan usaha	(0) Sebagian besar tidak memiliki pemahaman; (1) Cukup banyak yang memiliki pemahaman; (2) Rata-rata sudah memahami; (3) Semua sudah memahami.	
2 Teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan	(0) Tidak dimiliki oleh semua perusahaan; (1) Dimiliki oleh sebagian perusahaan; (2) Dimiliki oleh sebagian besar perusahaan; (3) Dimiliki oleh semua perusahaan.	
3 Teknik konservasi lahan	(0) Tidak ada yang menguasai; (1) Sangat sedikit yang menguasai; (2) Sedikit yang menguasai; (3) Sebagian besar menguasai	
4 Keberadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kawasan wisata Rembangan	(0) Tidak ada; (1) Minim, belum cukup; (2) Sudah memadai; (3) Sangat memadai.	
5 Teknik pengelolaan pembangunan yang baik	(0) Tidak dipahami; (1) Sangat sedikit dipahami; (2) Sedikit dipahami; (3) Dipahami oleh perusahaan.	
6 Pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha	(0) Hampir tidak pernah dilakukan; (1) Sangat jarang dilakukan; (2) Jarang dilakukan; (3) Rutin dilakukan dan sudah memadai.	
7 Keberadaan SDM pengawas dalam tata kelola usaha	(0) Sangat kurang; (1) Kurang; (2) Sudah cukup namun belum efektif; (3) Sudah cukup dan efektif dalam menjalankan pengawasa.	
8 Keberadaan program dan teknik pengembangan usaha	(0) Sangat kurang; (1) Cukup kurang; (2) Sudah cukup namun belum efektif; (3) Sudah cukup dan efektif dalam menjalankan pengawasan.	

Lampiran 3. Pemberian Skor Atribut Keberlanjutan

A. Dimensi Ekologi (Lingkungan)

Nama Responden	Dimensi Ekologi (Lingkungan)	Kondisi kawasan Rembangan	Luas lahan hijau	Pertumbuhan tanaman hijau	Kualitas air	Gangguan terhadap ekosistem	Frekuensi kekeringan	Pelestarian lahan hijau	Pemanfaatan usaha	Perubahan perilaku masyarakat	Rehabilitasi lahan	Penerapan aturan tentang lingkungan
Mega		3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
Dewi		3	3	3	2	3	2	1	0	3	2	2
Tjahyo		3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
Hendra		2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3
Indah		2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3
Kukuh		3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3
Agus		3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2
Luluk		3	3	3	2	3	2	1	0	3	2	2
Siti		2	2	3	3	2	2	2	0	3	2	2
Endi		2	2	3	3	2	2	2	0	3	2	2
Argo		2	2	3	3	2	2	2	0	3	2	2
Isdianto		3	2	3	1	1	2	1	1	3	1	1
Hartanto		3	3	3	3	3	2	3	1	3	2	2
Menik		2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
Andika		2	3	2	3	3	2	2	0	3	2	3
Frans		2	2	3	2	1	2	0	1	2	1	1

Job		3	3	3	1	3	2	3	0	3	3	3
Syaiful		2	3	3	3	2	2	0	1	3	1	0
Yungry		2	3	3	3	3	2	2	1	3	2	2
Muklis	MEDIAN	2	3	3	1	3	2	1	1	3	1	0
Saleh		3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2
Bambang		3	3	3	2	2	1	2	2	3	2	2
Sueono		3	3	3	2	2	1	2	2	3	2	2
Lejar		3	3	3	2	2	1	2	1	3	2	2
Yasin		3	3	3	2	2	1	2	2	3	2	2
Sunaryo		3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	3
Nanang		3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
Maksum		3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
Latifah		3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2
Lasdi		3	3	3	3	3	2	2	1	3	3	2
Suryono		3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3
Wahyudi		3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
Ratna		3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
Srini		3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3
Agustin		3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
Hol		3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2
Rifah		3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2
Dewwi		3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
Hermanto		3	3	3	3	3	2	0	2	3	3	2
Reference fisheries:												
GOOD	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
DOWN	4	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3

Anchor Fisheries:	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
	4	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
	5	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	6	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	7	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	12	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
	13	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
	14	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
	15	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
	16	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	17	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	18	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

B. Dimensi Ekonomi

Nama Responden	Dimensi Ekonomi	Penciptaan peluang usaha	Pengaruh pendapatan masyarakat	Pengaruh pendapatan pihak swasta	Nilai ekonomi lahan wisata	Aktivitas ekonomi pasca pembangunan	Kontribusi terhadap PAD	Program pengembangan masyarakat	Biaya kerusakan lingkungan	Program ekonomi masyarakat sekitar
Mega		3	3	2	2	3	2	3	2	2
Dewi		2	3	3	2	3	1	1	1	1
Tjahyo		3	2	2	2	2	1	1	1	1
Hendra		3	2	2	2	2	1	1	1	1
Indah		3	3	3	1	3	2	3	3	2
Kukuh		2	2	2	1	3	3	3	2	1
Agus		3	3	3	2	3	1	1	1	1
Luluk		2	2	2	1	2	1	1	1	2
Siti		3	3	2	2	2	1	1	1	2
Endi		3	3	2	2	2	1	1	1	2
Argo		2	3	2	1	2	1	2	3	2
Isdianto		3	2	3	2	2	2	2	2	2
Hartanto		2	2	2	2	2	2	1	2	2
Menik		2	2	2	2	1	2	2	1	2
Andika		2	2	2	2	2	1	1	1	1
Frans		3	3	3	3	3	2	2	0	0
Job		3	2	1	2	2	1	1	0	1
Syaiful		2	1	1	2	3	1	1	1	1

Yungry		2	3	2	1	1	2	1	1	1
Muklis	MEDIAN	3	3	3	2	3	2	3	3	1
Saleh		2	2	2	3	3	3	3	2	1
Bambang		2	2	2	1	3	3	3	2	1
Sueono		2	2	2	2	2	3	3	2	1
Lejar		2	2	2	1	3	3	2	2	1
Yasin		3	3	3	1	3	1	3	3	3
Sunaryo		3	3	3	1	2	2	2	2	2
Nanang		3	3	3	2	2	1	2	2	3
Maksum		3	3	3	2	2	2	2	2	2
Latifah		3	3	3	2	2	2	2	2	2
Lasdi		2	3	3	3	2	2	2	2	3
Suryono		2	3	2	2	3	2	3	3	2
Wahyudi		3	3	3	1	2	2	2	2	2
Ratna		3	3	3	2	3	2	1	3	3
Srini		3	3	3	2	3	2	3	1	2
Agustin		2	3	3	1	3	2	1	1	2
Hol		3	3	3	2	3	2	1	1	2
Rifah		3	3	2	2	3	2	3	2	3
Dewwi		2	3	3	2	3	2	1	2	2
Hermanto		3	3	3	2	3	2	3	2	2
Reference fisheries:										
GOOD	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
DOWN	4	0	0	0	0	0	3	3	3	3
Anchor Fisheries:										
	1	3	7	3	3	3	3	3	3	0
	2	3	3	3	3	3	3	3	0	0

3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
4	3	3	3	3	3	3	0	0	0
5	3	3	3	3	0	0	0	0	0
6	3	3	3	0	0	0	0	0	0
7	3	3	0	0	0	0	0	0	0
8	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	0	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3	3
13	0	0	0	0	3	3	3	3	3
14	0	0	0	3	3	3	3	3	3
15	0	0	3	3	3	3	3	3	3
16	0	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3

C. Dimensi Sosial

Nama Responden	Dimensi Sosial									
	Penyerapan tenaga kerja	Konflik kesenjangan	Hubungan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial	Pengaruh terhadap nilai sosial-budaya	Pengaruh terhadap tingkat pendidikan	Kesadaran perbaikan lingkungan	Persepsi masyarakat adanya wisata	Keseriusan dan kepedulian masalah sosial	
Mega	3	2	3	3	3	3	2	2	2	
Dewi	2	2	3	2	3	1	1	2	2	
Tjahyo	3	2	3	3	3	3	2	2	2	
Hendra	2	2	3	2	2	1	1	2	2	
Indah	2	2	3	2	2	1	1	2	2	
Kukuh	3	3	3	2	3	2	3	3	3	
Agus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Luluk	2	2	3	2	3	1	1	2	2	
Siti	2	2	3	2	3	1	1	2	2	
Endi	2	2	3	2	3	1	1	2	2	
Argo	2	2	3	2	3	1	1	2	2	
Isdianto	3	1	2	2	3	1	0	2	3	
Hartanto	3	3	3	3	3	2	2	3	3	
Menik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Andika	2	2	3	3	2	2	2	2	2	
Frans	1	2	2	2	3	2	1	2	1	
Job	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
Syaiful	1	1	3	1	1	1	1	2	1	

Yungry		2	3	3	2	2	0	1	2	3
Muklis	MEDIAN	2	1	3	2	3	2	1	2	1
Saleh		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bambang		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sueono		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lejar		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Yasin		3	3	3	3	3	3	2	3	3
Sunaryo		3	3	3	3	3	1	3	3	3
Nanang		2	2	2	2	3	2	2	3	2
Maksum		3	3	3	2	3	1	3	3	2
Latifah		2	2	2	2	2	3	2	2	2
Lasdi		3	3	3	2	3	2	3	3	3
Suryono		3	3	3	3	3	2	2	2	3
Wahyudi		3	3	3	2	3	2	3	3	2
Ratna		2	2	2	2	3	2	2	3	2
Srini		3	3	3	3	3	2	2	2	3
Agustin		3	3	3	2	3	2	3	3	2
Hol		3	3	3	2	3	2	3	3	2
Rifah		3	3	3	2	3	2	3	3	2
Dewwi		3	3	3	3	3	1	3	3	3
Hermanto		3	3	3	3	3	2	3	3	2
Reference fisheries:										
GOOD	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
DOWN	4	0	0	0	0	0	3	3	3	3
Anchor Fisheries:										
	1	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	2	3	3	3	3	3	3	3	0	0

3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
4	3	3	3	3	0	0	0	0	0
5	3	3	3	0	0	0	0	0	0
6	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	0	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3	3
11	0	0	0	0	3	3	3	3	3
12	0	0	0	3	3	3	3	3	3
13	0	0	3	3	3	3	3	3	3
14	0	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3

D. Dimensi Hukum dan Regulasi

Nama Responden	Dimensi Hukum dan Regulasi	Ketersediaan aturan tentang lingkungan	Kepatuhan menjaga lingkungan hidup	Penyuluhan tentang lingkungan	Penegakan hukum pelanggaran lingkungan	Konflik pemegang usaha dengan masyarakat	Konflik pemegang usaha dengan para pihak	Kerjasama yang berwawasan lingkungan	Permasalahan ganti rugi lahan	Kepastian hukum menjalankan usaha	Hukum terhadap gangguan operasi perusahaan
Mega	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Dewi	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Tjahyo	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
Hendra	1	2	2	2	0	2	2	1	3	2	0
Indah	1	2	2	2	0	2	2	1	3	2	0
Kukuh	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Agus	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Luluk	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Siti	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
Endi	2	2	2	2	1	2	2	2	3	1	1
Argo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
Isdianto	3	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Hartanto	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
Menik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Andika	1	2	2	2	1	2	2	2	3	1	1
Frans	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1
Job	3	3	2	2	0	2	2	2	2	1	1
Syaiful	1	2	1	1	0	3	3	2	3	1	1

Yungry		3	3	2	1	3	2	2	3	1	1
Muklis	MEDIAN	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1
Saleh		3	3	2	2	3	3	3	3	2	2
Bambang		2	3	3	2	3	3	2	3	3	3
Sueono		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lejar		2	3	3	3	2	2	3	3	3	3
Yasin		3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Sunaryo		3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
Nanang		2	2	2	2	2	2	1	3	2	1
Maksum		3	3	2	2	3	3	2	3	2	2
Latifah		2	2	2	2	2	2	1	3	2	1
Lasdi		2	3	1	2	3	3	3	3	2	2
Suryono		3	3	3	2	2	3	3	3	2	2
Wahyudi		3	3	1	2	3	3	3	3	2	1
Ratna		2	2	2	2	2	2	1	3	2	1
Srini		3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
Agustin		3	3	2	2	3	3	3	3	1	1
Hol		2	3	2	2	3	3	3	3	2	2
Rifah		2	3	2	2	3	3	3	3	2	2
Dewwi		3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
Hermanto		3	3	2	2	3	3	3	3	2	2
Reference fisheries:											
GOOD	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
DOWN	4	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
Anchor Fisheries:											
	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0

3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
4	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
5	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
13	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
14	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
15	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
16	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

E. Dimensi Kelembagaan

Nama Responden	Dimensi Kelembagaan	Susunan dan manajemen kelembagaan	Kinerja SDM	Peran lembaga pemerintah	Cara dan strategi menarik wisatawan	Pengelolaan mengatasi kendala dan hambatan	Strategi terhadap pengembangan Rembangan	Keterlibatan lembaga pengembangan Rembangan	Peran lembaga dalam pencapaian tujuan
Mega	2	2	2	3	2	3	2	1	
Dewi	2	2	2	1	2	2	1	1	
Tjahyo	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hendra	2	2	2	2	2	2	2	2	
Indah	2	1	2	2	2	2	1	1	
Kukuh	2	2	2	3	2	3	3	3	
Agus	2	2	2	2	2	1	1	2	
Luluk	1	2	2	2	2	2	2	2	
Siti	2	1	1	2	2	2	2	2	
Endi	2	1	1	2	2	2	2	2	
Argo	2	2	2	1	1	1	3	3	
Isdianto	2	2	2	2	2	1	3	3	
Hartanto	1	2	2	2	2	2	2	2	
Menik	1	2	2	2	2	2	2	2	
Andika	2	2	2	2	2	2	1	2	
Frans	3	1	2	2	1	1	2	1	
Job	2	2	2	2	1	1	1	1	
Syaiful	2	2	2	2	2	2	2	1	

Yungry		2	1	2	2	2	2	1	2
Muklis	MEDIAN	2	2	3	2	1	2	3	3
Saleh		1	2	2	2	2	3	1	1
Bambang		2	2	2	1	2	1	3	1
Sueono		2	1	2	2	2	3	3	2
Lejar		1	2	2	1	2	3	3	3
Yasin		2	2	2	2	2	1	3	3
Sunaryo		2	2	1	1	2	2	2	2
Nanang		2	2	2	2	2	2	2	2
Maksum		2	2	1	1	2	2	2	2
Latifah		2	2	2	2	2	2	3	2
Lasdi		2	3	2	3	3	3	2	1
Suryono		2	1	2	2	2	1	2	2
Wahyudi		2	1	1	1	1	2	1	2
Ratna		2	2	3	3	1	3	1	2
Srini		1	2	3	2	2	2	2	2
Agustin		1	2	2	2	2	2	3	2
Hol		2	2	2	2	2	2	3	2
Rifah		2	1	2	2	2	1	2	1
Dewwi		2	1	2	2	2	1	3	1
Hermanto		3	2	3	2	2	2	3	3

Reference fisheries:

GOOD	1	3	3	3	3	3	3	3	3
BAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0
UP	3	3	3	3	0	0	0	0	0
DOWN	4	0	0	0	0	3	3	3	3

Anchor Fisheries:

1	3	3	3	3	3	3	3	0
2	3	3	3	3	3	3	0	0

3	3	3	3	3	3	0	0	0
4	3	3	3	0	0	0	0	0
5	3	3	0	0	0	0	0	0
6	3	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	3	3	3
10	0	0	0	3	3	3	3	3
11	0	0	3	3	3	3	3	3
12	0	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3

F. Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

Nama Responden	Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	Pemahaman tentang promosi	Teknik rehabilitasi lahan hijau	Teknik konservasi lahan	Keberadaan sarana pendukung	Pengelolaan pembangunan yang baik	Pengawasan pemerintah	Keberadaan SDM pengawas	Keberadaan program pengembangan
Mega		3	3	2	2	2	2	2	3
Dewi		2	2	1	1	3	3	2	2
Tjahyo		1	1	1	2	2	2	2	2
Hendra		1	1	1	2	2	2	2	2
Indah		2	3	2	1	2	3	3	3
Kukuh		2	3	3	2	3	3	2	2
Agus		2	2	1	1	3	3	2	2
Luluk		1	1	2	1	2	3	2	2
Siti		1	1	2	1	2	2	3	2
Endi		1	1	2	1	2	3	2	2
Argo		1	2	3	1	3	3	0	2
Isdianto		3	2	2	2	3	3	3	3
Hartanto		2	2	2	2	2	2	2	2
Menik		1	1	1	1	1	2	2	2
Andika		0	1	1	1	1	1	1	2
Frans		0	0	1	1	2	3	1	2
Job		1	0	0	1	1	2	2	2
Syaiful		1	1	1	1	2	3	2	2

Yungry		0	1	1	1	1	1	1	2
Muklis	MEDIAN	2	3	3	1	3	3	3	3
Saleh		2	3	3	2	3	3	2	2
Bambang		2	3	2	2	2	2	2	2
Sueono		2	3	1	2	3	2	2	2
Lejar		2	3	3	2	1	2	2	2
Yasin		2	3	3	2	3	3	3	3
Sunaryo		2	2	2	2	2	2	2	2
Nanang		2	3	3	1	2	3	3	2
Maksum		2	2	2	2	3	3	3	2
Latifah		2	2	3	1	2	3	3	3
Lasdi		3	2	2	1	3	3	3	3
Suryono		2	3	3	1	2	3	3	3
Wahyudi		2	2	2	2	3	3	3	2
Ratna		3	2	3	1	3	3	3	3
Srini		2	2	3	2	3	3	3	3
Agustin		2	3	2	2	3	3	3	3
Hol		2	3	2	2	3	3	3	3
Rifah		2	3	3	2	3	3	3	3
Dewwi		2	3	3	2	3	2	2	2
Hermanto		2	3	3	2	3	3	3	3

Reference fisheries:

GOOD	1	3	3	3	3	3	3	3	3
BAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0
UP	3	3	3	3	0	0	0	0	0
DOWN	4	0	0	0	0	3	3	3	3

Anchor Fisheries:

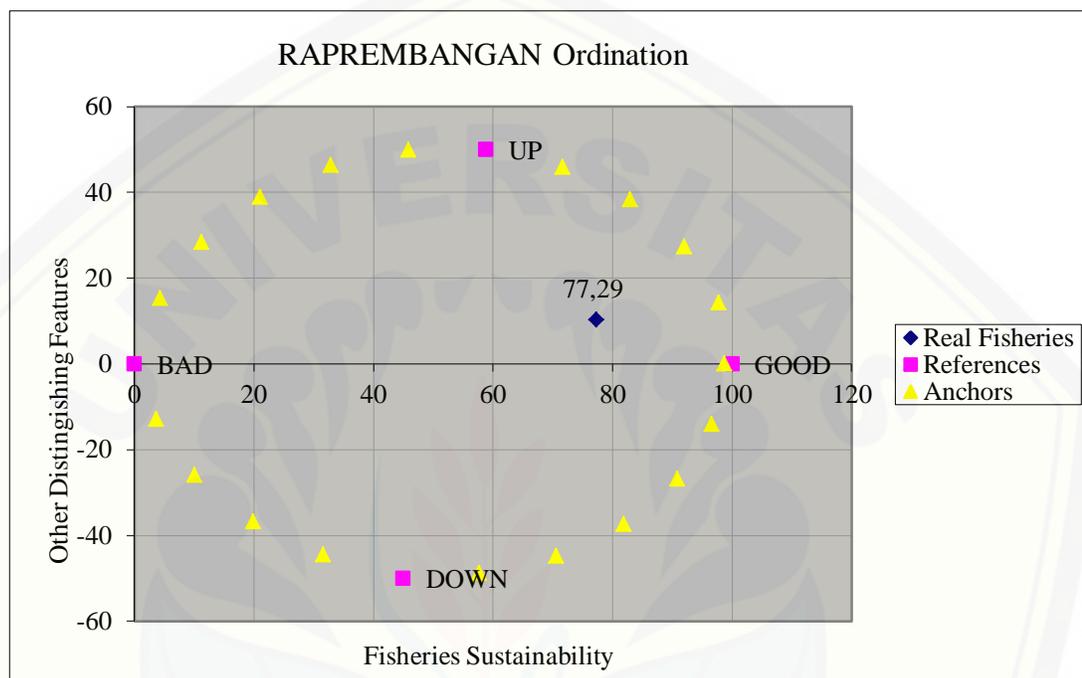
1	3	3	3	3	3	3	3	0
2	3	3	3	3	3	3	0	0

3	3	3	3	3	3	0	0	0
4	3	3	3	0	0	0	0	0
5	3	3	0	0	0	0	0	0
6	3	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	3	3	3
10	0	0	0	3	3	3	3	3
11	0	0	3	3	3	3	3	3
12	0	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3

Lampiran 4. Hasil Analisis Rap-Rembangan

1) Dimensi Ekologi (Lingkungan)

a) Hasil Analisis Rap-Rembangan Ordination

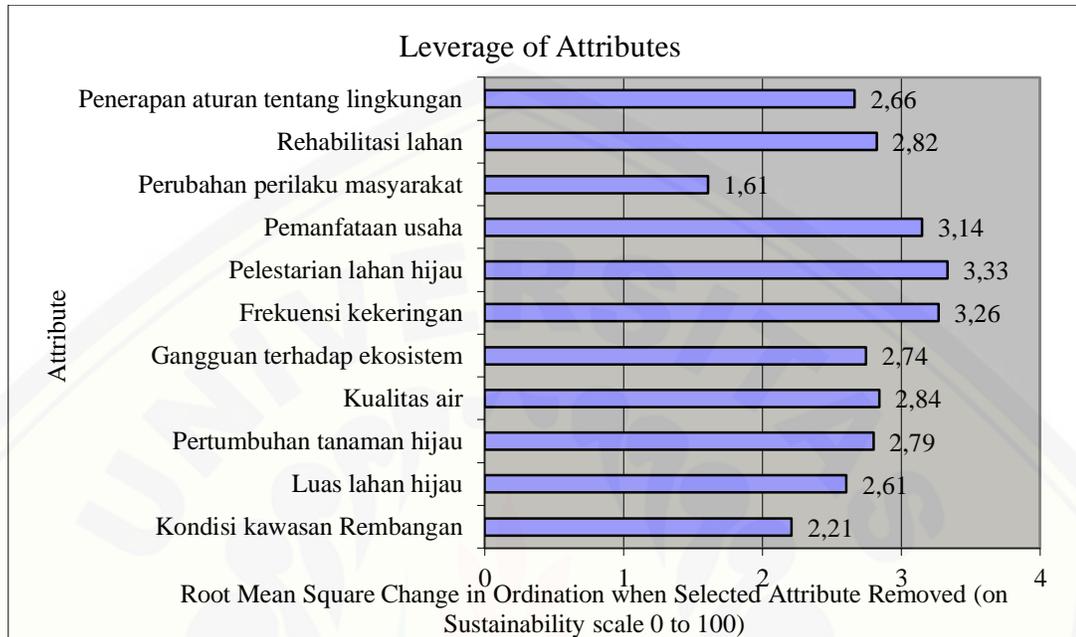


Keterangan:

Nilai Rap-Rembangan Ordination = 77,29 (Berkelanjutan)

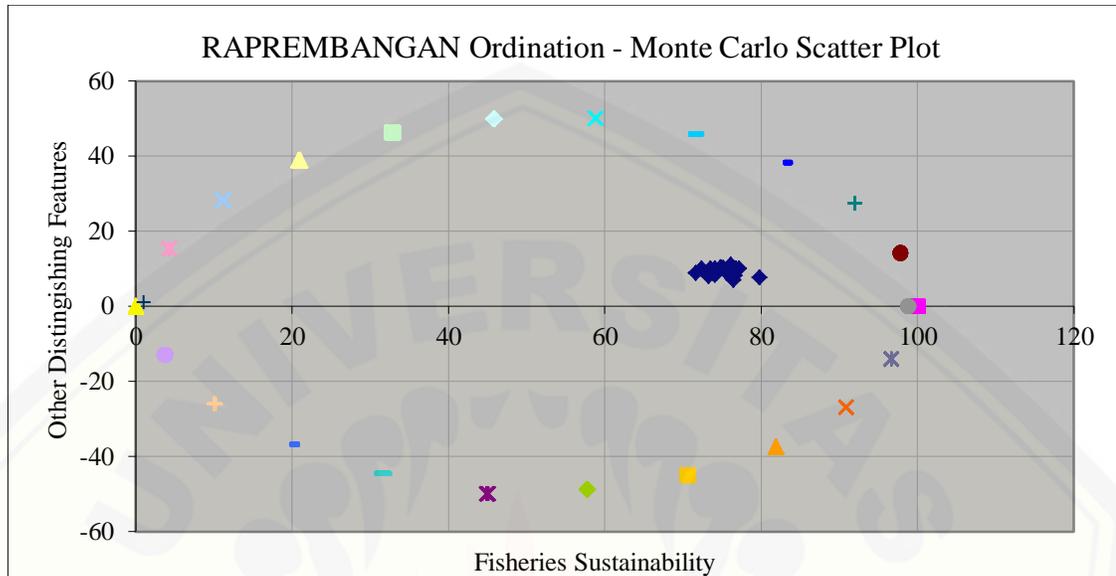
Nilai Stress = 0,134 < 0,25 (Hasil Analisis Baik)

Nilai R² = 0,954

b) Hasil Analisis *Leverage of Attributes*

Keterangan nilai RMS pada masing-masing atribut, antara lain:

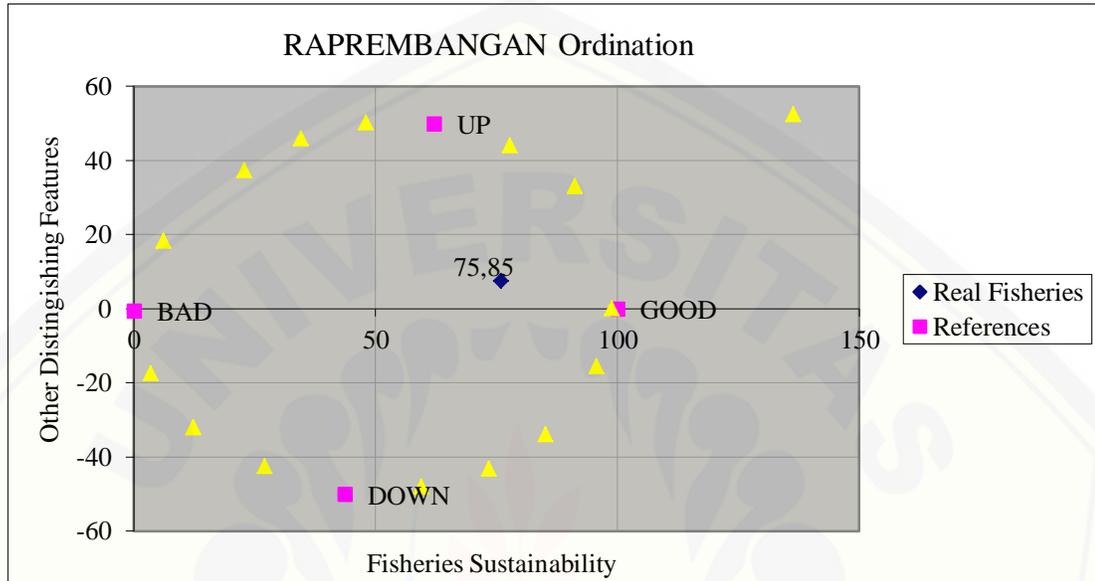
No.	Atribut	Root Mean Square (%)
1.	Kondisi kawasan Rembangan	2,21
2.	Luas lahan hijau	2,61
3.	Pertumbuhan tanaman hijau	2,79
4.	Kualitas air	2,84
5.	Gangguan terhadap ekosistem	2,74
6.	Frekuensi kekeringan	3,26
7.	Pelestarian lahan hijau	3,33
8.	Pemanfaatan usaha	3,14
9.	Perubahan perilaku masyarakat	1,61
10.	Rehabilitasi lahan	2,82
11.	Penerapan aturan tentang lingkungan	2,66

c) Hasil Analisis *Monte Carlo*

Titik pusat evaluasi (*scatter plot*) hasil pengulangan sebanyak 25 kali dan berada pada rentang nilai 71,65 – 76,14.

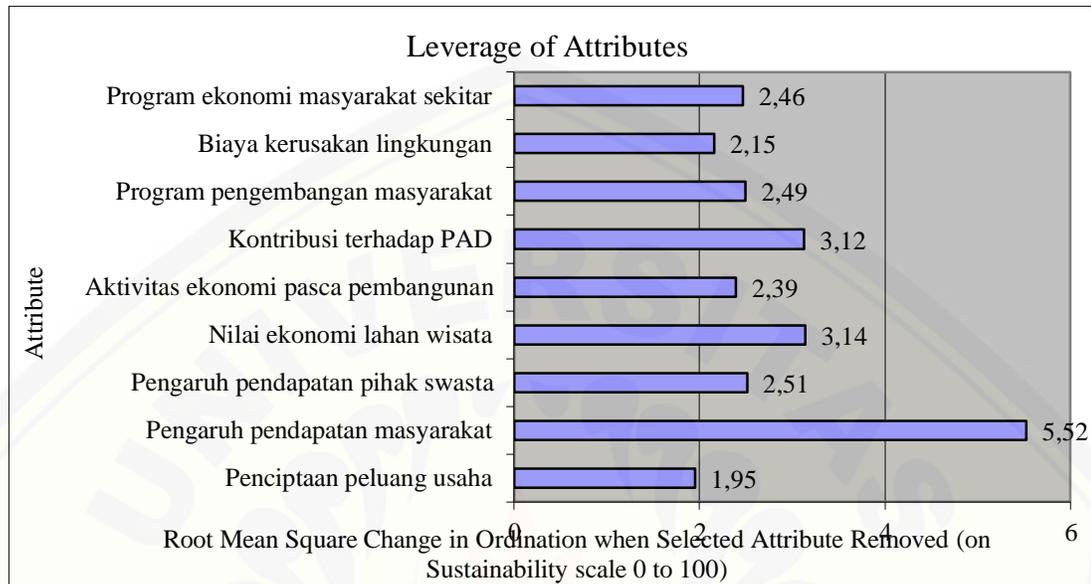
2) Dimensi Ekonomi

a) Hasil Analisis *Rap-Rembangan Ordination*



Keterangan:

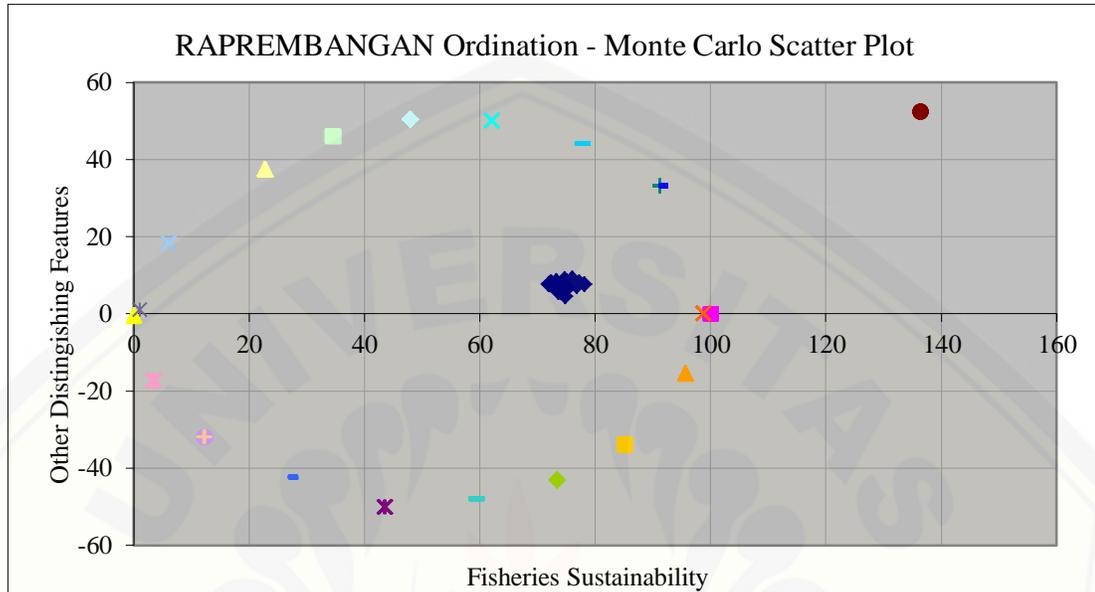
- Nilai *Rap-Rembangan Ordination* = 75,85 (Berkelanjutan)
- Nilai *Stress* = 0,148 < 0,25 (Hasil Analisis Baik)
- Nilai R^2 = 0,943

b) Hasil Analisis *Leverage of Attributes*

Keterangan nilai RMS pada masing-masing atribut, antara lain:

No.	Atribut	Root Mean Square (%)
1.	Penciptaan peluang usaha	1,95
2.	Pengaruh pendapatan masyarakat	5,52
3.	Pengaruh pendapatan pihak swasta	2,51
4.	Nilai ekonomi lahan swasta	3,14
5.	Aktivitas ekonomi pasca pembangunan	2,39
6.	Kontribusi terhadap PAD	3,12
7.	Program pengembangan masyarakat	2,49
8.	Biaya kerusakan lingkungan	2,15
9.	Program ekonomi masyarakat sekitar	2,46

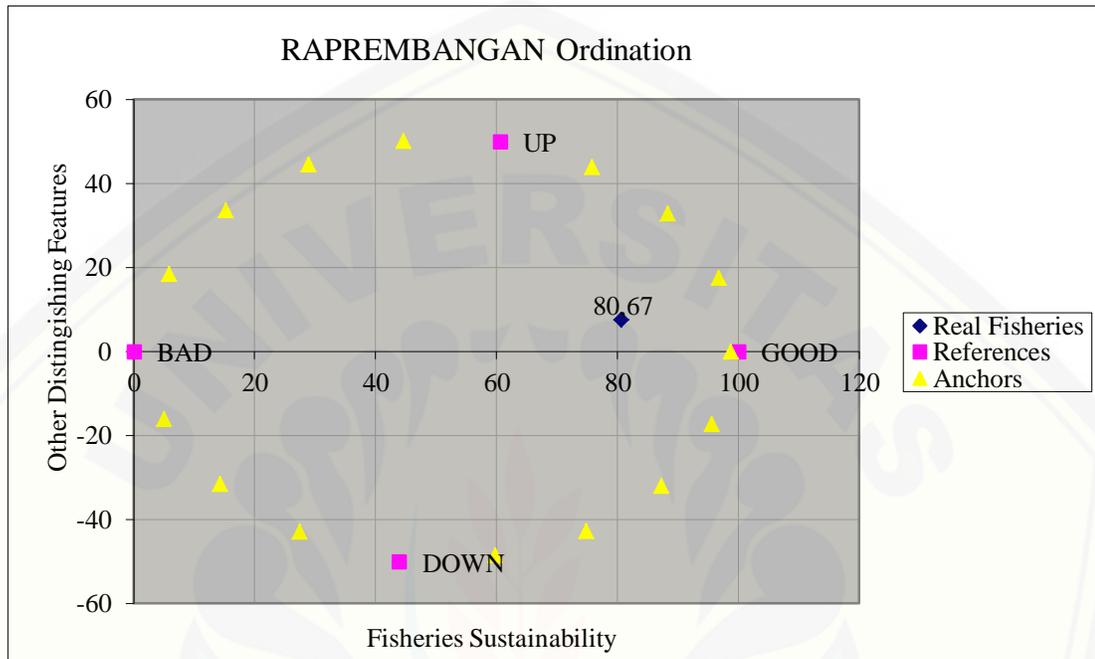
c) Hasil Analisis *Monte Carlo*



Titik pusat evaluasi (*scatter plot*) hasil pengulangan sebanyak 25 kali dan berada pada rentang nilai 72,35 – 76,80.

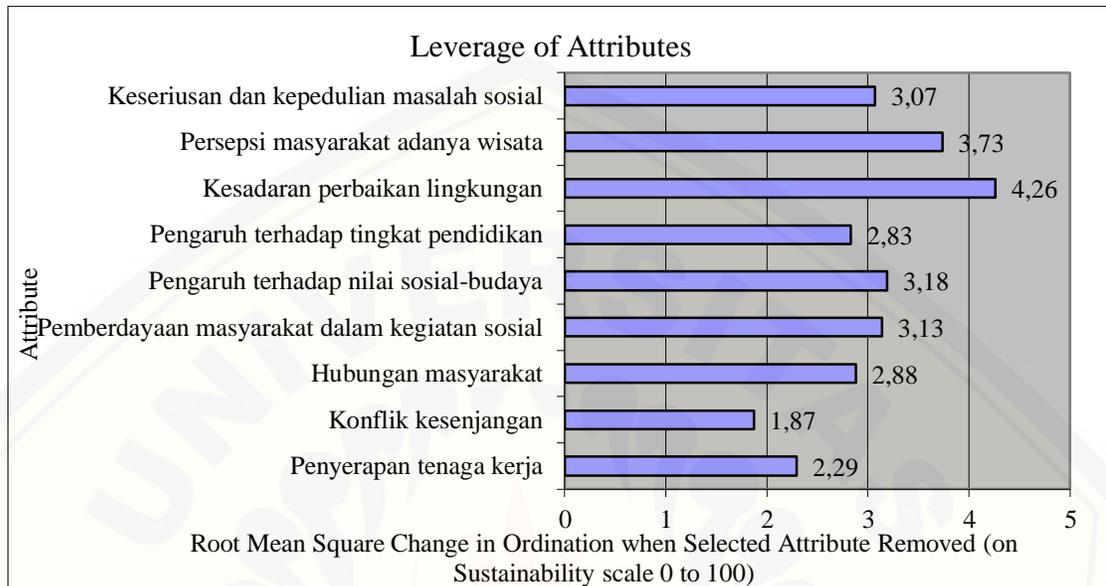
3) Dimensi Sosial

a) Hasil Analisis *Rap-Rembang Ordination*



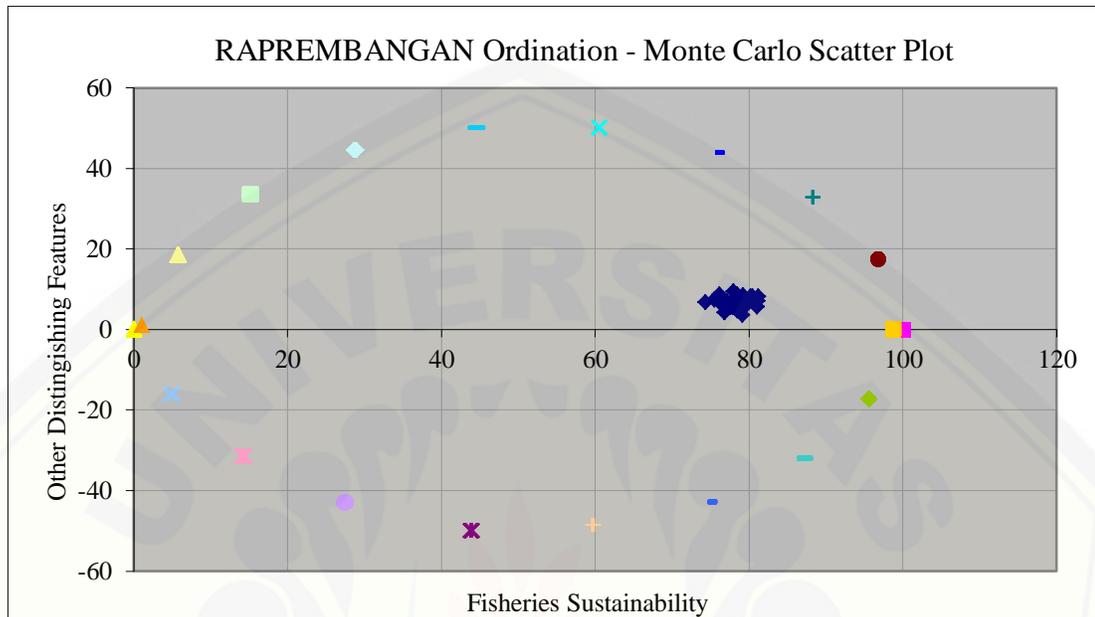
Keterangan:

Nilai <i>Rap-Rembang Ordination</i>	=	80,67	(Berkelanjutan)
Nilai <i>Stress</i>	=	0,136	(Hasil Analisis Baik)
Nilai R^2	=	0,955	

b) Hasil Analisis *Leverage of Attributes*

Keterangan nilai RMS pada masing-masing atribut, antara lain:

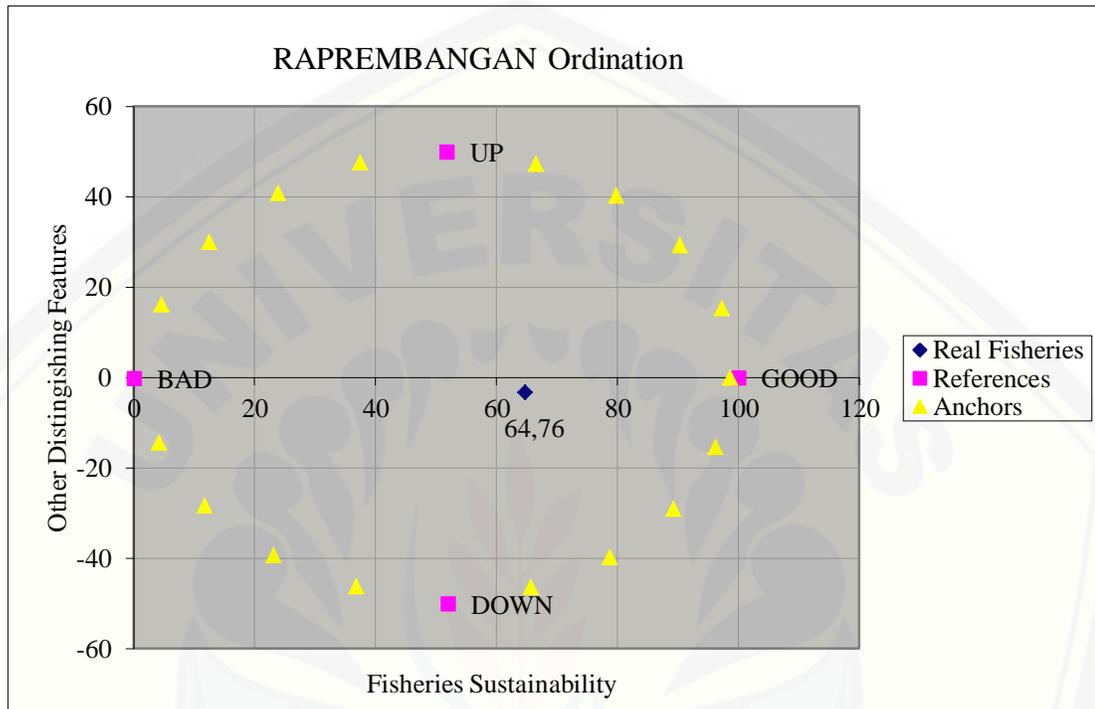
No.	Atribut	Root Mean Square (%)
1.	Penyerapan tenaga kerja	2,29
2.	Konflik kesenjangan	1,87
3.	Hubungan masyarakat	2,88
4.	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial	3,13
5.	Pengaruh terhadap nilai sosial-budaya	3,18
6.	Pengaruh terhadap tingkat pendidikan	2,83
7.	Kesadaran perbaikan lingkungan	4,26
8.	Persepsi masyarakat adanya wisata	3,73
9.	Keseriusan dan kepedulian masalah sosial	3,07

c) Hasil Analisis *Monte Carlo*

Titik pusat evaluasi (*scatter plot*) hasil pengulangan sebanyak 25 kali dan berada pada rentang nilai 76,16 – 81,03.

4) Dimensi Hukum dan Regulasi

a) Hasil Analisis *Rap-Rembangan Ordination*

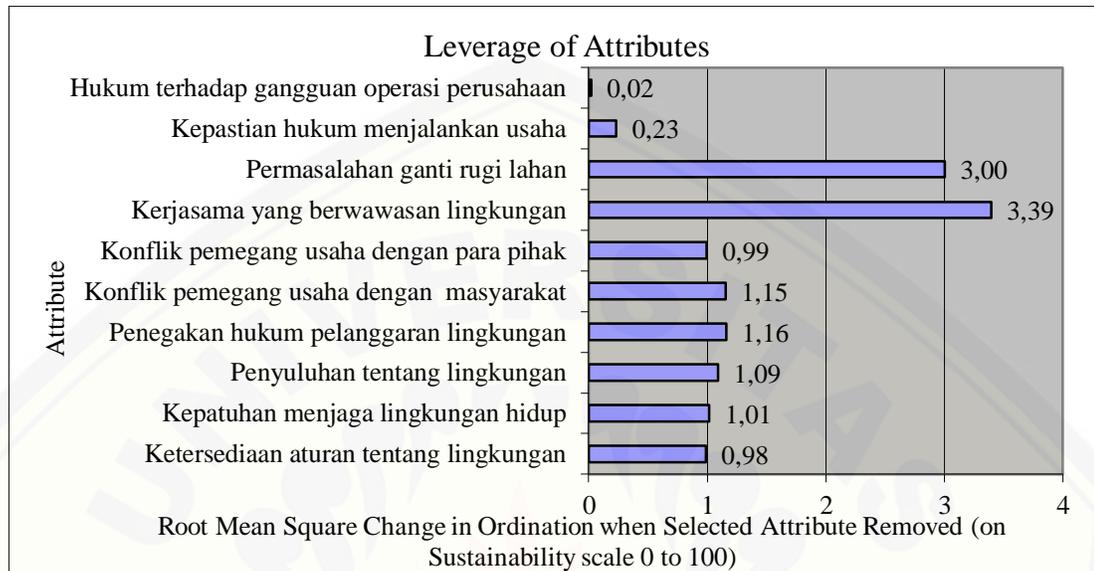


Keterangan:

Nilai *Rap-Rembangan Ordination* = 64,76 (Cukup Berkelanjutan)

Nilai *Stress* = 0,145 < 0,25 (Hasil Analisis Baik)

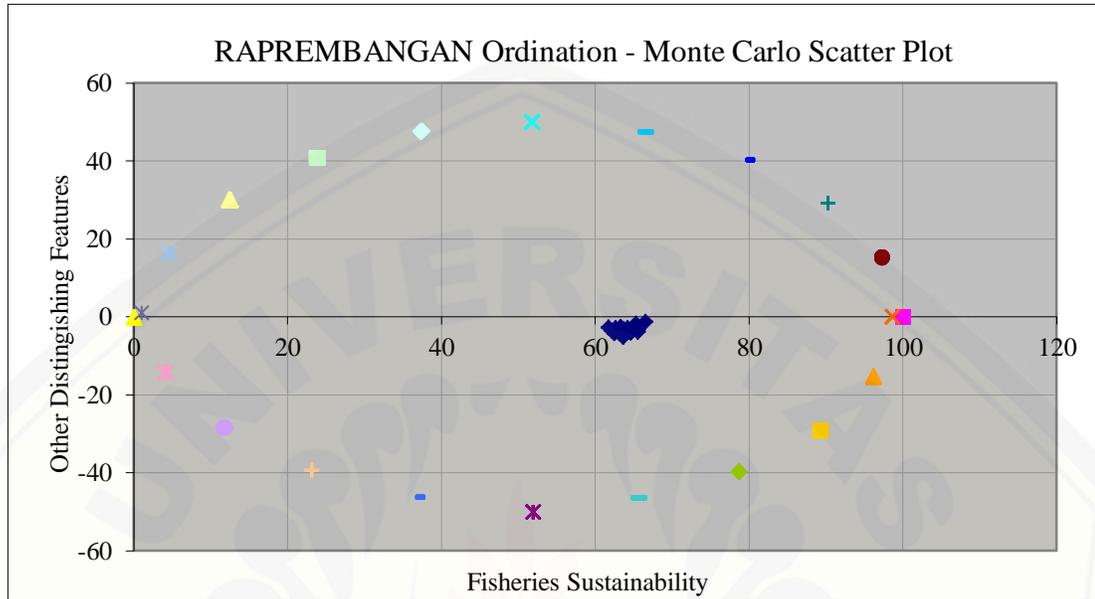
Nilai R^2 = 0,949

b) Hasil Analisis *Leverage of Attribute*

Keterangan nilai RMS pada masing-masing atribut, antara lain:

No.	Atribut	Root Mean Square (%)
1.	Ketersediaan aturan tentang lingkungan	0,98
2.	Kepatuhan menjaga lingkungan hidup	1,01
3.	Penyuluhan tentang lingkungan	1,09
4.	Penegakan hukum pelanggaran lingkungan	1,16
5.	Konflik pemegang usaha dengan masyarakat	1,15
6.	Konflik pemegang usaha dengan para pihak	0,99
7.	Kerjasama yang berwawasan lingkungan	3,39
8.	Permasalahan ganti rugi lahan	3,00
9.	Kepastian hukum menjalankan usaha	0,23
10.	Hukum terhadap gangguan operasi perusahaan	0,02

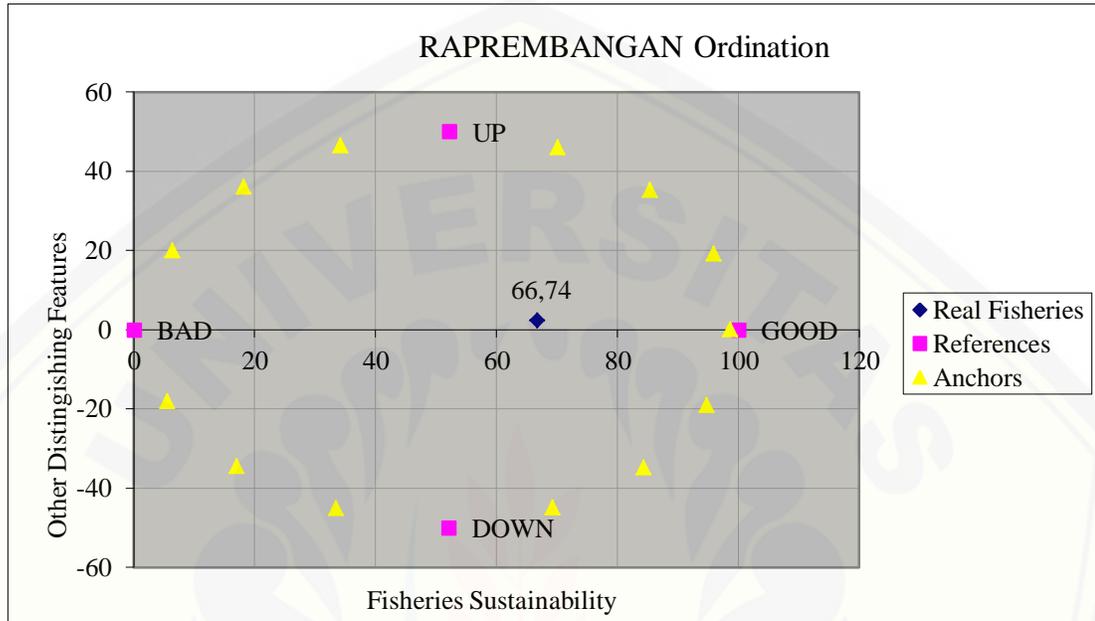
c) Hasil Analisis *Monte Carlo*



Titik pusat evaluasi (*scatter plot*) hasil pengulangan sebanyak 25 kali dan berada pada rentang nilai 62,47 – 66,53.

5) Dimensi Kelembagaan

a) Hasil Analisis *Rap-Rembangan Ordination*

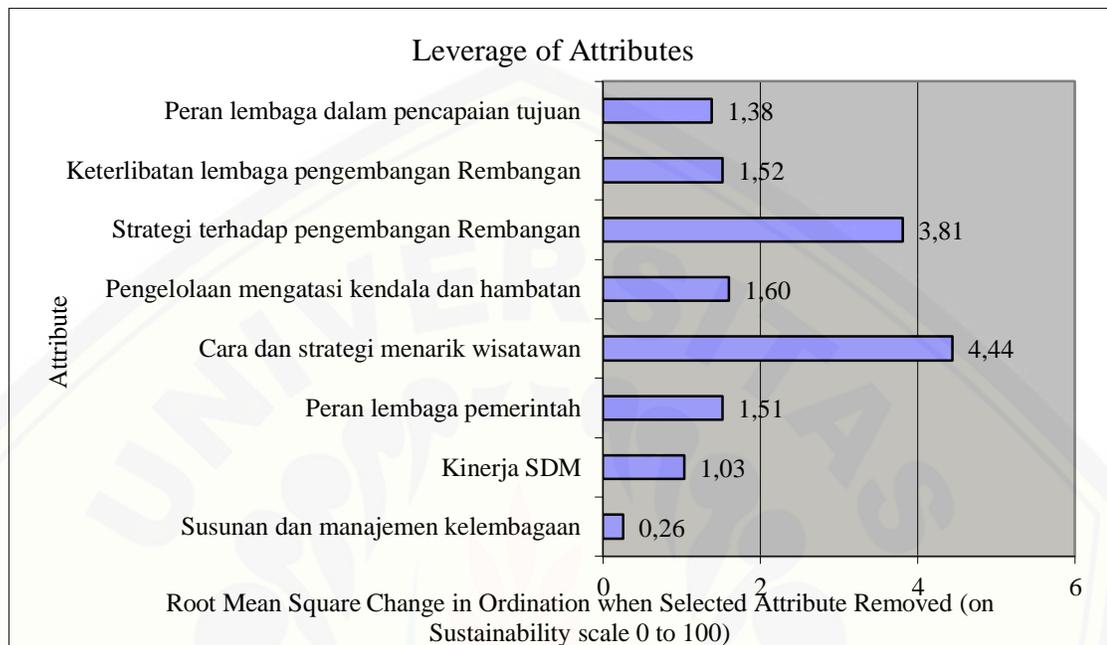


Keterangan:

Nilai *Rap-Rembangan Ordination* = 66,74 (Cukup Berkelanjutan)

Nilai *Stress* = 0,147 < 0,25 (Hasil Analisis Baik)

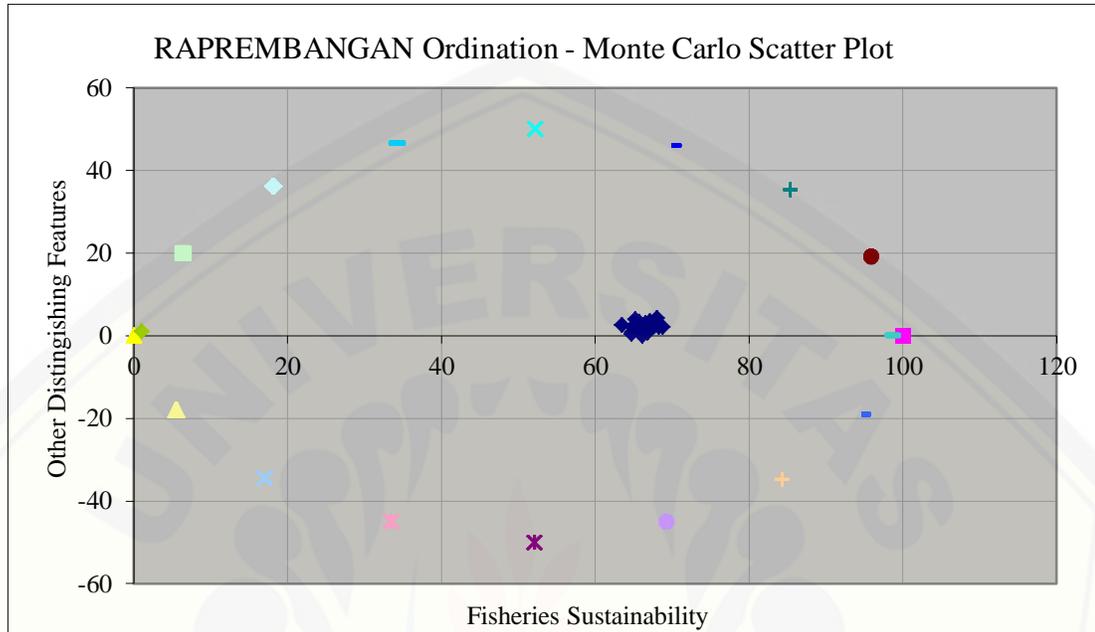
Nilai R^2 = 0,949

b) Hasil Analisis *Leverage of Attributes*

Keterangan nilai RMS pada masing-masing atribut, antara lain:

No.	Atribut	Root Mean Square (%)
1.	Susunan dan manajemen kelembagaan	0,26
2.	Kinerja SDM	1,03
3.	Peran lembaga pemerintah	1,51
4.	Cara dan strategi menarik wisatawan	4,44
5.	Pengelolaan mengatasi kendala dan hambatan	1,60
6.	Strategi terhadap pengembangan Rembangan	3,81
7.	Keterlibatan lembaga pengembangan Rembangan	1,52
8.	Peran lembaga dalam pencapaian tujuan	1,38

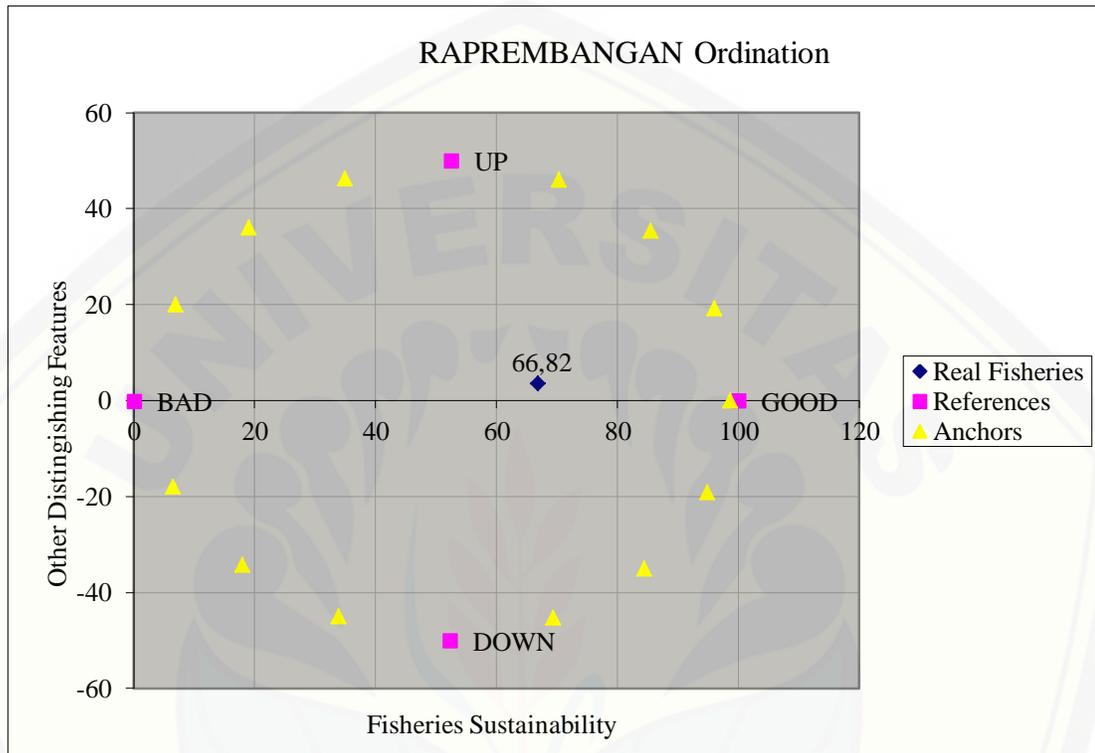
c) Hasil Analisis *Monte Carlo*



Titik pusat evaluasi (*scatter plot*) hasil pengulangan sebanyak 25 kali dan berada pada rentang nilai 63,44 – 66,30.

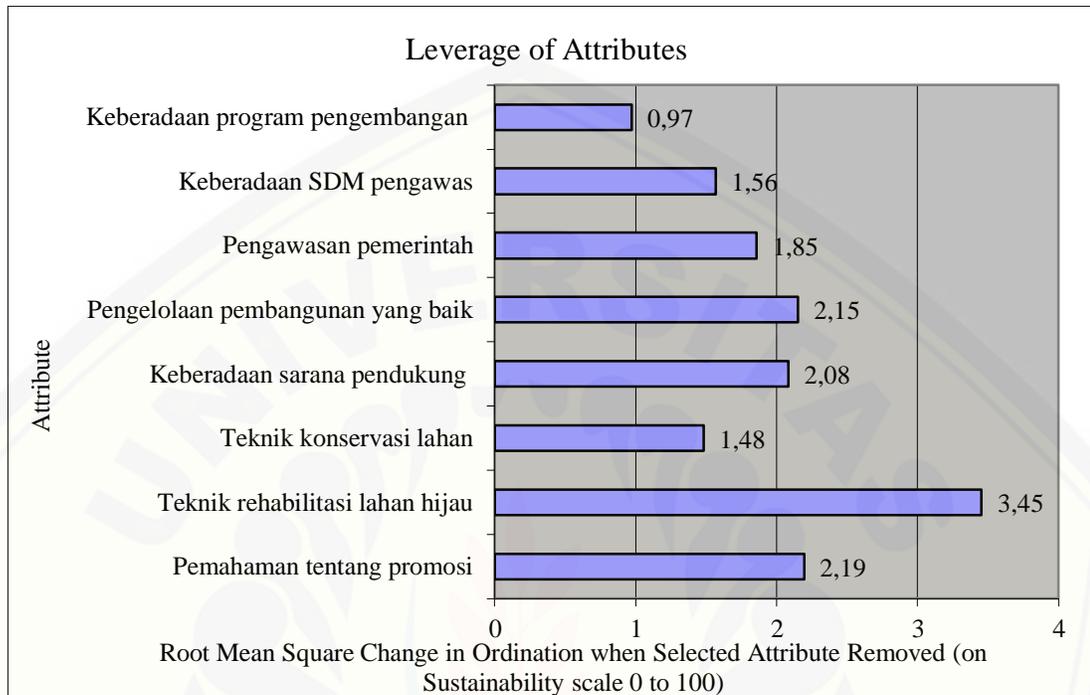
F) Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

a) Hasil Analisis *Rap-Rembangan Ordination*



Keterangan:

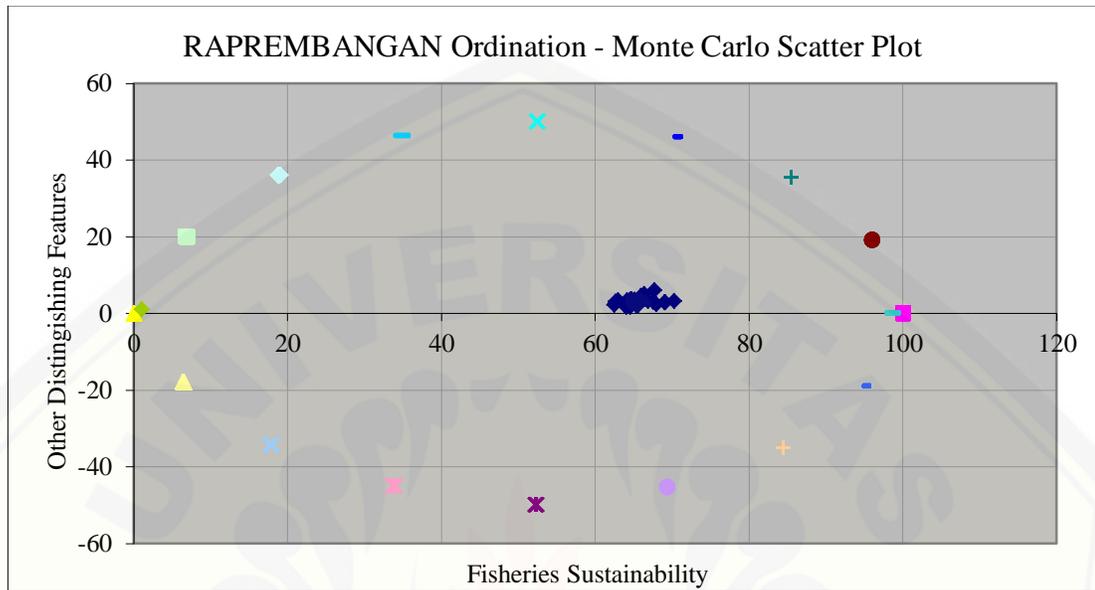
Nilai *Rap-Rembangan Ordination* = 66,82 (Cukup Berkelanjutan)
 Nilai *Stress* = 0,142 (Hasil Analisis Baik)
 Nilai = 0,950

b) Hasil Analisis *Leverage of Attributes*

Keterangan nilai RMS pada masing-masing atribut, antara lain:

No.	Atribut	Root Mean Square (%)
1.	Pemahaman tentang promosi	2,19
2.	Teknik rehabilitasi lahan hijau	3,45
3.	Teknik konservasi lahan	1,48
4.	Keberadaan sarana pendukung	2,08
5.	Pengelolaan pembangunan yang baik	2,15
6.	Pengawasan pemerintah	1,85
7.	Keberadaan SDM pengawas	1,56
8.	Keberadaan program pengembangan	0,97

c) Hasil Analisis *Monte Carlo*



Titik pusat evaluasi (*scatter plot*) hasil pengulangan sebanyak 25 kali dan berada pada rentang nilai 62,93 – 69,08.

Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian 1

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/2645/314/2017

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 0489/UN25.3.1/LT/2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Yuni Fridawati 130810101190
Instansi : Fakultas Ekonomi & Bisnis/ IESP / Universitas Jember
Alamat : Perum Pondok Mutiara A-32 Jember / No. Hp. 081315450625
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Analisis Pengembangan Kawasan Wisata Rembangan di Kabupaten Jember".
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : April s/d Oktober 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 17-04-2017
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik


ACHMAD DAVID F., S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19690912 199602 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Unej;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian 2



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a
 Yth. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
 Rembangan.....
 di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 072/2645/314/2017

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 0489/UN25.3.1/LT/2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Yuni Fridawati 130810101190
 Instansi : Fakultas Ekonomi & Bisnis/ IESP / Universitas Jember
 Alamat : Perum Pondok Mutiara A-32 Jember / No. Hp. 081315450625
 Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
 "Analisis Pengembangan Kawasan Wisata Rembangan di Kabupaten Jember".
 Lokasi : Jalan Rembangan, Kemuning Lor, Arjasa, Jember.....
 Waktu Kegiatan : April s/d Oktober 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 17-04-2017
 An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER
 Kabid. Kajian Strategis dan Politis


ACHMAD DAVID E., S.Sos
 Penata Tk. I
 NIP. 19690912-199602 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Unej;
 2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian











